



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan. Oleh karena itu, pada hakikatnya apa yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan laporan terhadap apa yang sudah direncanakan dalam dokumen RPJMD 2014-2019.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

3.1.1. INDIKATOR KINERJA

Kinerja diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang dilakukan melalui media Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2015 dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya (tahun 2014).

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Interpretasi atas pencapaian sasaran strategis serta indikator makro berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran LKjIP
Tahun 2015

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber : Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014

3.1.2. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,63	70,34	73,25*	104,14	70,56	103,81
2.	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,315	0,340*	92,06	0,295	84,75
3.	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	NA	0,4086	0,4073*	100,32	0,4046	99,33
4.	Persentase penduduk miskin	Persen	12,98	11,98	12,98*	91,65	8,00	37,75
5.	IPM	Indeks	73,67	74,34	66,35*	89,25	75,94	87,37
6.	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,46	5,6-6,1	5,69	100,00	6,4-7,1	84,30
7.	PDRB per kapita	Juta Rp	9,77	10,48	10,48	100,00	15,06	69,59
8.	Laju inflasi	Persen	7,91	6±1	3,60	128,00	4±1	128,00
9.	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	92,54	96,32	96,13	99,80	97,97	98,12
10.	Pengeluaran konsumsi	Juta Rp	26,06	27,47	27,90	101,57	38,38	72,69

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
	rumah tangga							
11.	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Persen	46,02	46,02	40,80	111,34	37,03	89,82
12.	Nilai tukar petani	-	105,11	105,11	106,48*	101,30	106,99	99,52
13.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	0,0038	0,0038	0,0025	65,79	0,0017	147,06
14.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	Persen	66,12	66,12	77,87	117,77	76,80	101,39
15.	Luas wilayah industry	Persen	0,22	0,22	0,39	177,27	0,37	105,41
16.	Lama proses perijinan (hari)	Hari	9	9	9	100,00	9	100,00
17.	Opini BPK "WTP"	-	WDP	WDP	WDP	100,00	WTP	75,00
18.	Nilai AKIP	-	CC	CC	CC	100,00	B	75,00
19.	Angka kriminalitas	Indeks	1,40	2,51	0,19	192,43	1,45	186,90
Persentase Capaian Kinerja IKU						108,45		97,15

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Magelang, 2016

Keterangan * : Angka Sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja dari IKU Kabupaten Magelang pada tahun 2015 adalah sebesar 108,45% (Sangat baik). Dari 19 (sembilan belas) IKU, 14 (empat belas) diantaranya tercapai. IKU Pemerintah Kabupaten Magelang yang merupakan indikator tujuan tersebut di atas termuat dalam RPJMD 2014-2019.

Pemerintah Kabupaten Magelang mencatatkan keberhasilan di dalam meningkatkan usia harapan hidup, menekan laju inflasi, meningkatkan nilai tukar petani, meningkatkan persentase rumah tangga yang menggunakan air

bersih, meningkatkan luasan wilayah industri, dan menekan angka kriminalitas.

PDRB **per kapita** pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar 10,48 juta per tahun. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Magelang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita Kabupaten Magelang 2011-2015 (Rp)

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
1.	2011	7.371.214,15	3.607.406,54
2.	2012	7.984.900,72	3.725.600,05
3.	2013	8.851.875,08	3.926.818,06
4.	2014	9.765.055,57	4,100,851.94
5.	2015*	10.477.222,22	4,236,060.74

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2016, * Proyeksi

Laju **inflasi** pada tahun 2015 menurun menjadi 3,60 jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 7,91. Tabel berikut menyajikan perkembangan laju inflasi di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.4
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Magelang Tahun 2011 – 2015

Tahun	Kab. Magelang	Prov. Jawa Tengah	Nasional
2011	2,64	2,68	3,79
2012	2,59	4,24	4,30
2013	8,49	7,99	8,38
2014	7,91	8,22	8,36
2015	3,60	2,73	3,35

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan, meskipun laju inflasi di Kabupaten Magelang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi provinsi dan nasional, namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan.

Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 96,13. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yang sebesar 95,94. Berikut perkembangan rasio penduduk yang bekerja selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.5
 Data Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Magelang 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	628.377	654.887	660.609	666.331	672.063
Kesempatan Kerja	590.807	625.635	632.450	639.264	646.021
Rasio penduduk yang bekerja	94,02	95,53	95,74	95,94	96,13

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2015 terjadi peningkatan rasio penduduk yang bekerja. Sedangkan menurut umur, rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Umur
 Di Kabupaten Magelang Tahun 2015

No	Golongan Umur	Tahun 2015		
		Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja
1.	15-19	39,488	33,098	83.82
2.	20-24	49,980	45,551	91.14
3.	25-29	64,594	62,154	96.22
4.	30-34	83,245	81,208	97.55
5.	35-39	76,050	74,936	98.53
6.	40-44	87,827	82,661	94.12
7.	45-49	78,059	76,066	97.45
8.	50-54	65,622	64,651	98.52
9.	55-59	40,357	39,407	97.65
10.	60+	86,841	86,290	99.37
	Jumlah	672,063	646,021	96.13

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kab. Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa total angkatan kerja pada tahun 2015 sebesar 672.063 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah terbesar adalah usia 40-44 tahun dengan jumlah 87.827 orang. Disusul usia 60+ dengan jumlah 86.290 orang.

Angka kriminalitas pada tahun 2015 adalah 0,19. Rasio ini menurun dibandingkan dengan tahun 2014, sebesar 1,40. Menurunnya **angka kriminalitas**, mengindikasikan terjadinya peningkatan kondusifitas, ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Magelang.

Jika dibandingkan **dengan tahun 2014**, capaian IKU pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan capaian kinerja. **Dibandingkan dengan target**

akhir **RPJMD**, capaian IKU pada tahun 2015 telah mencapai rata-rata 97,15%.

Capaian **kinerja IKU Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2015** dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja IKU antara
Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kabupaten Magelang	Prov. Jawa Tengah
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,25*	
2.	Indeks Gini	Indeks	0,340*	0,3969,67
3.	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,4073*	0,659
4.	Persentase penduduk miskin	Persen	12,98*	13,58
5.	IPM	Indeks	66,35*	68,78
6.	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,69	5,4*
7.	PDRB per kapita	Juta Rp	10.48	6,7*
8.	Laju inflasi	Persen	3,60	8,22

Sumber : *BAPPEDA Kab. Magelang dan Pemprov. Jawa Tengah, 2016*

3.1.3. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Persentase Capaian Kinerja per Sasaran Strategis
Kabupaten Magelang Tahun 2015

No	Misi/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian 2015	% hingga akhir periode RPJMD
I.	Misi I Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama	57	116,13	105,48
	Sasaran:			
I.1	Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan	10	165,20	164,70
I.2	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol	5	100,29	91,94
I.3	Kualitas pembangunan yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan dan akses terhadap pendidikan	23	99,82	104,94
I.4	Terwujudnya pengembangan pemuda berkarakter serta berkesempatan berolahraga	5	89,83	75,73
I.5	Meningkatnya penguasaan iptek, dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca	3	92,37	84,44

No	Misi/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian 2015	% hingga akhir periode RPJMD
I.6	Meningkatnya pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	3	116,86	113,97
I.7	Berkurangnya kualitas dan kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan berkurangnya jumlah penduduk miskin	2	162,53	137,01
1.8	Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya, beragama serta bermoral berdasarkan nilai-nilai Pancasila	3	124,37	116,63
1.9	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan berperan serta dalam pembangunan	3	93,87	59,99
II.	Misi II Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing	51	102,37	85,78
	Sasaran:			
II.1	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja	6	104,50	118,01
II.2	Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal	4	114,51	109,37
II.3	Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah	4	64,07	41,36
II.4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	2	105,71	104,10
II.5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	21	99,66	94,56
II.6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	5	111,22	89,17
II.7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	3	140,05	94,07
II.8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	3	104,46	68,35
II.9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	3	77,13	53,05
III.	Misi III Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah	15	156,43	99,75
	Sasaran:			
III.1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	3	100,85	95,55

No	Misi/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian 2015	% hingga akhir periode RPJMD
III.2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	3	121,95	113,63
III.3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	2	306,97	99,05
III.4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	7	95,96	90,78
IV.	Misi IV Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup	14	94,26	82,39
	Sasaran:			
IV.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	7	88,75	85,30
IV.2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	5	123,48	49,26
IV.3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	2	70,54	56,34
V.	Misi V Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis	23	103,01	100,31
	Sasaran:			
V.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	4	100,00	100,00
V.2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	10	96,06	88,02
V.3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	3	111,11	111,11
V.4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	6	104,85	102,12
VI.	Misi VI Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat	6	81,19	57,71
	Sasaran:			
VI.1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	2	69,45	41,67

No	Misi/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian 2015	% hingga akhir periode RPJMD
VI.2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	4	92,92	73,75
	Jumlah	166	108,90	88,57

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dari 31 sasaran strategis dan 166 indikator sasaran strategis, rata-rata capaiannya adalah sebesar 108,90% (sangat baik). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019, maka capaian pada tahun 2015 telah mencapai rata-rata 88,57% (baik).

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Magelang Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan strategis untuk mencapai 31 (tiga puluh satu) sasaran strategis dari 166 (seratus enam puluh enam) indikator kinerja sasaran strategis, dalam 6 (enam) misi Pemerintah Kabupaten Magelang 2014-2019. Pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut.

MISI I	:	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama
---------------	----------	---

Sasaran Strategis I.1	:	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan
------------------------------	----------	---

Pembangunan kesehatan memiliki arah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat terwujud. Jajaran kesehatan daerah khususnya di kabupaten/kota dituntut untuk melaksanakan fungsi pokok sistem kesehatan, yaitu mengarahkan sektor kesehatan setempat, manajemen sumber daya kesehatan yang terbatas, penyediaan biaya kesehatan yang memadai dan melakukan pelayanan kesehatan.

Tujuan sistem kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tanggap/*responsive* dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan berkualitas, keadilan (*fairness*) dalam pembiayaan kesehatan hal ini

sesuai dengan World Health Report Tahun 2000 (WHO). *Assesment* kinerja pada tingkat kabupaten/kota perlu dilakukan untuk menilai kinerja sektor kesehatan kabupaten/kota agar dapat dilakukan upaya membantu kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja masih rendah. Upaya tersebut dapat dilakukan provinsi maupun pusat dalam bentuk bantuan teknis dan manajemen, maupun bantuan sumber daya lainnya (sumber daya manusia, keuangan, perbekalan, obat, peralatan dan lain-lain).

Kesehatan merupakan hal mendasar yang menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Dalam rangka memperbaiki akses, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan salah satu Sasaran Startegis I.1 yaitu : *Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan*.

Tolok ukur capaian keberhasilan Sasaran Strategis I.1 tersebut di atas terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, yang merupakan urusan Kesehatan. Secara keseluruhan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis I.1 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.1.
 Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	14	11	10	109,09	11	109,09
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	7,98	6,80	7,30	92,65	6,50	87,69
3.	Persentase Balita gizi Buruk	Persen	0,15	0,15	0,03	900,00	0,15	900,00
4.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Permil	9,06	8,00	8,63	92,13	8,00	92,13
5.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	113,16	113,16	100,00	113,16
6.	Cakupan Desa/Kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
	Universal Child Immunization (UCI)							
7.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	28,30	90,00	29,20	32,44	90,00	32,44
9.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	2,35	100,00	7,31	7,31	100,00	7,31
10.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	104,26	95,00	99,91	105,17	95,00	105,17
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.1						165,20		164,70

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.1 : Meningkatnya *Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan* pada tahun 2015 adalah **165,20% (sangat baik)**.

Beberapa indikator kinerja berhasil memenuhi target, seperti **Kasus Kematian Ibu Melahirkan, Persentase Balita Gizi Buruk, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**, serta **Cakupan kunjungan bayi**.

Persentase Balita Gizi Buruk pada tahun 2015 adalah 0,03%. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 30 Balita yang menderita gizi buruk, yang tersebar di Kabupaten Magelang, dari total 91.897 Balita. Berikut data Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.10
Data Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang, 2011-2015

No	Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase (%)
1.	2011	26	98.210	0.03
2.	2012	13	98.084	0.01
3.	2013	28	96.960	0.03
4.	2014	36	94.610	0.05
5.	2015	30	91.897	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase Balita Gizi Buruk bersifat fluktuatif, namun menunjukkan penurunan pada tahun 2015.

Indikator **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA** masih jauh dari harapan, dimana dari 90,00% yang ditargetkan pada tahun 2015, baru tercapai 29,20% yang tertangani. Hal ini disebabkan karena terjadinya *droup out* ketika layanan pengobatan TBC BTA harus berkelanjutan, dimana hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan individu dan keluarganya.

Demikian juga dengan **Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**, dimana dari 100,00% yang ditargetkan hanya tercapai 7,31%. Hal ini disebabkan karena jumlah pasien miskin yang berobat menurun, selain itu terdapat kesalahan sasaran pada PPLS 2011 dan belum dilakukan pembaharuan data, hal ini mengakibatkan penerima jaminan pelayanan kesehatan warga miskin baik melalui BPJS maupun Jamkesda berkurang, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya pemanfaatan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Untuk meningkatkan capaian beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada awal tahun, perlu dilakukan revitalisasi peran dan fungsi Desa Siaga dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) serta keterlibatan seluruh komponen masyarakat.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian urusan kesehatan pada tahun 2015 banyak yang mengalami peningkatan kinerja, dari 10 (sepuluh) indikator, 9 (sembilan) diantaranya mengalami kenaikan.

Capaian kinerja urusan pendidikan sampai dengan tahun 2015, jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019 sebagian besar telah melampaui target, dengan rata-rata capaian sebesar 164,70% (sangat baik).

Dibandingkan dengan capaian nasional, capaian kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2015
dengan Provinsi Jawa Tengah dan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah	Target Nasional 2015
1.	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	10	619	11
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	7,30	10	6,80
3.	Persentase Balita gizi Buruk	Persen	0,03 (30 kasus)	922 (Kasus)	NA
4.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Permil	8,63	11,64	8,00
5.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	113,16	47,90	100,00
6.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100,00	99,95	100,00
7.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00
8.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	29,20	117	100,00
9.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	7,31	NA	100,00
10.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99,91	97,55	90,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan capaian provinsi, **Angka Kematian Bayi (AKB)** berada di bawah angka provinsi, begitu juga dengan **Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup**. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, **Kasus Kematian Ibu Melahirkan** telah berada di bawah target nasional. Sedangkan **AKB dan AKB per 1000 Kelahiran Hidup** masih di atas target nasional.

Anggaran dalam mencapai target pada Sasaran Strategis I.1 adalah sebesar Rp 146.397.310.892,00 dengan realisasi sebesar Rp 112.521.252.445,00 atau 76,86%. Proporsi terbesar dari anggaran itu dilaksanakan melalui Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat (76,18%) yang peruntukannya digunakan untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis I.1 antara lain:

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta SDM kesehatan.
2. Kurangnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan;
2. Pengembangan kualitas sumberdaya kesehatan;
3. Peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Program-program yang dilaksanakan untuk mewujudkan capaian Sasaran Strategis I.1 adalah :

1. Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Pengawasan Obat Dan Makanan
4. Promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
5. Perbaikan gizi masyarakat
6. Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9. Pelayanan kesehatan penduduk miskin
10. Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
11. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata
12. Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
13. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
14. Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Sasaran Strategis 1.2	:	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol
------------------------------	----------	--

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya penambahan penduduk. Sedangkan Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN).

Tolok ukur keberhasilan Sasaran Strategis 1.2. *Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol* terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, yang merupakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan hasil pengukurannya sebagai berikut:

Tabel 3.12
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2.
 Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Rerata	1,73	1,69	1,31	122,49	1,57	108,28
2.	Rasio Akseptor KB	-	77,29	81,30	77,93	95,85	81,50	95,62
3.	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	77,29	80,69	77,93	96,58	80,89	96,34
4.	Keluarga Pra Sejahtera	Persen	26,18	22,50	24,47	91,24	20,18	78,74
5.	Keluarga Sejahtera I	Persen	18,01	16,38	17,15	95,3	14,38	80,74
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2						100,29		91,94

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.2: *Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol* pada tahun 2015 adalah **100,29% (sangat baik)**.

Rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2015 tercapai 1,31, sehingga capaian kinerja tahunannya 122,49%. Sedangkan indikator-indikator yang lain, yaitu **Rasio Akseptor KB, Cakupan Peserta KB Aktif, Keluarga Pra Sejahtera**, dan **Keluarga Sejahtera I**, capaiannya masih di bawah target tahunan.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan kinerja yang signifikan, namun **jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019**, capaian pada tahun 2015 rata-ratanya masih dibawah target, yaitu 91,94%.

Berikut adalah perkembangan data kinerja pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.13
Perkembangan Data
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Rerata	1,6	1,6	1,6	1.73	1,31
2.	Rasio Akseptor KB	-	78,8	81,8	75,2	77.29	77,93
3.	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	78,8	81,8	75,2	77.29	77,93
4.	Keluarga Pra Sejahtera	Persen	96.610*	88.261*	93.256*	92.743*	24,47
5.	Keluarga Sejahtera I	Persen	58.129*	59.500*	60.528*	63.778*	17,15

**Angka absolut*

Sumber : Bapermaspuan dan KB Kab. Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera mempunyai kecenderungan membaik. Hal ini terlihat pada Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga, yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2015, yaitu 1,31, demikian juga Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2015.

Berikut adalah gambaran pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk mendukung ketercapaian Sasaran strategis I.2 di Kabupaten Magelang tahun 2015:



Ket. Photo: Sarana Mobil Pelayanan KB keliling, banner ajakan ber KB, dan kegiatan sosialisasi KB

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan Sasaran Strategis I.2 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.962.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.468.793.950,00 atau sebesar 83,35%.

Hambatan dan kendala dalam mendukung ketercapaian Sasaran Strategis I.2 antara lain:

1. Masih tingginya *Unmetneed* angka DO, angka Komplikasi dan Kegagalan, Pernikahan Usia Dini;
2. Partisipasi Pria untuk berKB masih rendah;
3. Penetapan Perkiraan Permintaan Masyarakat dalam pelayanan KB terlalu tinggi, jauh melebihi kemampuan Pemerintah Kabupaten Magelang;
4. PUS Tua (42-49 th), yang termasuk *Unmetneed* tidak ikut KB karena sudah tidak mau ikut KB, dengan alasan sudah tua;
5. Keterbatasan Tenaga Penyuluh yang tinggal sedikit rata-rata 1 penyuluh menangani 5-6 desa bahkan ada kecamatan yang 1 Penyuluh KB membina 10 desa binaan padahal idealnya 1 penyuluh 2 desa;
6. Khusus untuk Medis Operasi Pria, animo masyarakat tidak merata di Kabupaten Magelang, hanya di daerah-daerah tertentu.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas antara lain:

1. Peningkatan dan pelembagaan keluarga kecil berkualitas melalui Program KB, serta sosialisasi dan peningkatan cakupan layanan KB;
2. Memasyarakatkan program KB melalui pembentukan Kampung KB;
3. Mengoptimalkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa.

Program-program yang mendukung pencapaian tujuan Sasaran Strategis I.2 adalah:

1. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
2. Program Keluarga Berencana;
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;

4. Program pelayanan Kontrasepsi;
5. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.

Sasaran Strategis I.3	:	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan
-----------------------	---	---

Tolok ukur keberhasilan Sasaran Strategis I.3 *Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan*, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.14
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.3.
 Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan
 Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap
 Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	APK PAUD	Persen	54,02	53,93	56,29	104,38	54,54	103,21
2.	Angka melek huruf	Persen	93,64	93,55	95,00	101,55	93,95	101,12
3.	Angka rata-rata lama sekolah	Persen	7,55	8,15	7,02	86,13	10,00	70,20
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	87,02	95,49	86,74	90,84	97,09	89,34
5.	APM SMP/ MTs/ Paket B	Persen	62,40	78,90	64,86	82,21	82,65	78,48
6.	APM SMA/MA/SMK/Paket C	Persen	36,03	55,56	37,58	67,64	66,56	56,46
7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	101,33	102,34	99,87	97,59	101,84	98,07
8.	APK SMP/MTs/Paket B	Persen	83,52	95,56	84,49	88,42	97,56	86,61
9.	APK SMA/MA/SMK/ Paket C	Persen	50,72	69,70	54,17	77,72	80,00	67,71
10.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,13	0,16	0,10	137,50	0,14	180,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
11.	APS SMP/MTs	Persen	0,51	0,65	0,31	152,31	0,57	267,74
12.	APS SMA/MA/SMK	Persen	0,54	0,87	0,55	159,77	0,81	194,55
13.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	99,56	99,40	99,98	100,25	99,98	100,00
14.	AL SMP/MTs	Persen	99,49	93,43	100,00	100,12	99,99	100,01
15.	AL SMA/ SMK/ MA	Persen	96,65	94,44	99,94	102,44	99,98	99,96
16.	Rerata Nilai UN SD/MI	Persen	7,75	7,66	7,25	94,65	7,75	93,55
17.	Rerata Nilai UN SMP/MTs	Persen	5,81	6,42	6,19	96,42	6,49	95,38
18.	Rerata Nilai UNSMA/ MA/ SMK	Persen	6,37	7,10	6,45	90,85	7,18	89,83
19.	Guru memenuhi Kualifikasi S1/D.4	Persen	73,93	83,00	77,18	92,99	88,00	87,71
20.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	Persen	89,70	89,02	90,08	101,19	89,62	100,51
21.	AM SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	Persen	71,86	68,22	75,30	110,38	71,55	105,24
22.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	Persen	67,97	78,48	62,68	79,87	86,74	72,26
23.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTs	Persen	86,29	85,72	69,09	80,60	91,43	75,57
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.3						99,82		104,94

Secara keseluruhan, Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.3 *Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan* pada tahun 2015 adalah 99,82% **(baik)**.

Indikator pada urusan pendidikan ini memuat 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Magelang. Dari indikator-indikator tersebut, tercatat 10

(sepuluh) indikator yang capaian kinerja tahunannya telah berhasil melampaui target.

APK PAUD meningkat signifikan dari 54,02 di tahun 2014 menjadi 56,29 di tahun 2015, dan capaian ini telah melampaui target RPJMD 2019. Selain itu, indikator **Angka Putus Sekolah** dari semua jenjang pendidikan telah melampaui target tahunan maupun target jangka menengah. Indikator kinerja **Guru memenuhi Kualifikasi S1/D.4** pada tahun 2015 capaian kerjanya menurun, menjadi 92,99%, dengan realisasi di bawah target tahunan. Meskipun demikian, secara jumlah dan persentase, angkanya selalu meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D4
Kabupaten Magelang Tahun 2015

No	Tahun	Guru S1/D4	Total Guru	Persentase
1.	2011	5.441	12.708	42,82
2.	2012	6.899	12.560	54,93
3.	2013	7.729	13.245	58,35
4.	2014	8.947	12.704	70,43
5.	2015	9.755	12.640	77,18

Tabel di atas menunjukkan bahwa, selama 5 (lima) tahun terakhir, persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 senantiasa menunjukkan peningkatan.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian Sasaran Strategis I.3 pada tahun 2015 banyak yang mengalami kenaikan, dimana dari 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja, 16 (enam belas) diantaranya mengalami kenaikan realisasi kinerja.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun 2019, Sasaran Strategis I.3 telah mencapai rata-rata 104,94%, artinya telah melampaui target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019.

Dibandingkan dengan capaian provinsi, capaian kinerja Sasaran Strategis I.3 di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Di Kabupaten Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah
1.	APK PAUD	56,29	75,12

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	86,74	98,43
3.	APM SMP/MTs/Paket B	64,86	79,51
4.	APM SMA/MA/SMK/Paket C	37,58	60,18
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	99,87	109,31
6.	APK SMP/MTs/Paket B	84,49	100,69
7.	APK SMA/MA/SMK/Paket C	54,17	74,01
8.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,10	0,077
9.	APS SMP/MTs	0,31	0,232
10.	APS SMA/MA/SMK	0,55	0,059
11.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	99,99
12.	AL SMP/MTs	100,00	99,81
13.	AL SMA/SMK/MA	99,94	99,97
14.	Rerata Nilai UN SD/MI	7,25	6,83
15.	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6,19	5,68
16.	Rerata Nilai UNSMA/MA/SMK	6,45	6,24
17.	Guru memenuhi Kualifikasi S1/D.4	77,18	78,23
18.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	90,08	97,89
19.	AM SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	75,30	83,90
20.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	62,68	67,97
21.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTs	69,09	79,36

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar capaian indikator kinerja urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Anggaran untuk mendukung capaian Sasaran Strategis I.3 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 163.650.748.797,00 dengan realisasi sebesar Rp 75.905.655.478,00 atau 46,38%. Hal ini disebabkan banyaknya anggaran Hibah/DAK yang tidak terserap karena terkendala peraturan (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis I.3 antara lain:

1. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan,
2. Kurangnya sarana prasarana pendidikan;

3. Perubahan peraturan dari pusat yang mempengaruhi teknis pelaksanaan pada tingkat SKPD.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal;
4. Penyesuaian dan keselarasan dengan peraturan dari pusat.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Strategis I.3 di atas adalah:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Sasaran Strategis I.4	:	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga
------------------------------	----------	--

Pembinaan olah raga di Kabupaten Magelang telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Sampai saat ini telah terbentuk sarana dan prasarana olah raga diantaranya:

1. Kepengurusan KONI di tingkat Kabupaten Magelang.
2. Telah dibangunnya stadion olah raga pada tahun 2014.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Strategis I.4 *Terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta berkesempatan berolahraga*. **Tolok ukur capaian keberhasilannya** terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.4.
Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter
serta Berkesempatan Berolah Raga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	14	24	24	100,00	27	88,89
2.	Jumlah organisasi olah raga	Organisasi	28	30	34	113,33	36	94,44
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	17	17	17	100,00	19	89,47
4.	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	23	24	23	95,83	24	95,83
5.	Lapangan olah raga	Permil	0,060	0,50	0,20	40,00	2,00	10,00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.4						89,83		75,73

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.4 *Terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta berkesempatan berolahraga* pada tahun 2015 adalah sebesar **89,83% (baik)**.

Ada 1 (satu) indikator kinerja, yaitu **Lapangan olahraga**, yang capaian realisasinya masih jauh dari yang diharapkan, dimana sampai dengan tahun 2015, data dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa terdapat 249 lapangan olah raga dengan perkiraan penduduk sebesar 1.245.482 jiwa, sehingga rasio lapangan olahraga adalah 0,20 per mil.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian tahun 2015 relatif sama, tercatat jumlah jenis organisasi olahraga yang mengalami peningkatan, dari 28 organisasi, menjadi 34 organisas pada tahun 2015.

Dibandingkan dengan target RPJMD 2019, capaian pada tahun 2015 telah mencapai rata-rata 75,73%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I.4 sebesar Rp 9.693.734.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.294.441.310,00 atau 44,30%

Permasalahan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis I.4 antara lain:

- 1. Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga;
- 2. Pencairan anggaran hibah terkendala peraturan.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga;
- 2. Penyelarasan dengan peraturan dari pusat.

Peningkatan kinerja pada Sasaran Strategis I.4 dilaksanakan melalui **program-program pendukung** sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
- c. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
- d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Sasaran Strategis I.5	:	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca
------------------------------	----------	---

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan perpustakaan diharapkan akan semakin meningkat. Ke depan, perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan koleksi buku dan majalah, namun perpustakaan lebih sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital, dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer. Sasaran Strategis I.5 Meningkatkan Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.5.
Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Jumlah perpustakaan	Unit	716	734	716	97,55	815	87,85

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhd target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	36.595	41.885	33.726	80,52	45.335	74,39
3.	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	2,01	2,06	2,04	99,03	2,24	91,07
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.5						92,37		84,44

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.5 *Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca* pada tahun 2015 adalah **92,37% (baik)**.

Jumlah perpustakaan tidak mengalami perubahan, yaitu 716 buah. **Jumlah pengunjung perpustakaan** mengalami penurunan, yaitu 33.726 orang pada tahun 2015, yang disebabkan karena adanya kegiatan stockopname pada triwulan IV di perpustakaan Grabag dan Deyangan.

Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah belum sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu 2,04% pada tahun 2015. Angka ini diperoleh dari (jumlah eksemplar koleksi bahan pustaka:judul koleksi bahan pustaka)x100%. Sesuai dengan data dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, tercatat 49.990 eksemplar bahan pustaka, dengan 24.512 judul buku pada tahun 2015.

Tabel berikut memuat gambaran data yang terkait dengan perpustakaan di Kabupaten Magelang,2010-2015:

Tabel 3.19
Data Perpustakaan Kabupaten Magelang, 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Keterangan
1.	Jumlah Pengunjung	26.606	41.014	41.187	40.259	36.595	33.726	
2.	Jumlah Eksemplar Koleksi	39.342	40.763	42.694	44.925	47.345	49.990	
3.	Jumlah Judul Koleksi	20.392	21.667	22.344	22.972	23.984	24.512	
4.	Jumlah Anggota	7.569	9.841	11.417	11.481	12.133	-	

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Keterangan
5.	Jumlah Peminjam	10.470	19.114	15.510	15.288	13.987	-	
6.	Jumlah Buku yang Dipinjam	20.054	28.606	24.156	18.762	18.186	-	
7.	Jumlah Perpustakaan	653	668	683	698	714	716	
	Perpustakaan Desa	104	119	134	149	164	164	
	Perpustakaan Masjid	8	8	8	8	8	8	
	Perpustakaan Kelompok Tani	1	1	1	1	1	1	
	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2	2	Wesleyan, STTP Tegalrejo
	Perpustakaan Khusus	4	4	4	4	4	5	Pengadilan Agama Setwan Puskesmas Salam Puskesmas Grabag Kejaksaan
	Perpustakaan Sekolah	529	529	529	529	529	529	
	Perpustakaan Keliling	2	2	2	2	2	2	
	Perpustakaan Umum	1	1	1	1	1	1	
	Perpustakaan Cabang	2	2	2	2	2	2	

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah koleksi, judul koleksi, jumlah anggota serta jumlah perpustakaan senantiasa mengalami peningkatan, sedangkan jumlah pengunjung, jumlah peminjam, dan jumlah buku yang dipinjam bersifat fluktuatif.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan berkurangnya anggaran untuk pengadaan buku perpustakaan.

Dibandingkan dengan target RPJMD 2019, capaian pada tahun 2015 baru mencapai rata-rata 84,44%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I.5 pada tahun 2015 sebesar Rp 530.995.835,00 dengan realisasi sebesar Rp 521.908.875,00 atau 98,29%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis I.5 adalah:

1. Terbatasnya sarana, prasarana perpustakaan daerah;
2. Rendahnya minat baca masyarakat.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

1. Peningkatan kecerdasan masyarakat dengan mengembangkan minat budaya baca;
2. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah;
3. Perbaikan kualitas pelayanan di perpustakaan melalui penyusunan Standar Penyelenggaraan dan Standar Pengelolaan.

Program yang mendukung untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I.5 adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Sasaran Strategis I.6	:	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan
------------------------------	----------	--

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis I.6 *Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan* terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yang capaian-capaian kinerjanya diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.6.
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,33	2,48	2,14	86,29	2,56	83,59
2.	Rasio KDRT	-	0,010	0,028	0,01	164,29	0,024	158,33

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
3.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Capaian Sasaran Strategis I.6						116,86		113,97

Persentase Capaian Sasaran Strategis I.6 *Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan* pada tahun 2015 adalah **116,86% (sangat baik)**.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2015 adalah sebesar 2,14%. Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah pekerja perempuan. Data dari BKD dan Bapernapuan dan KB Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 5.926 pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dari total 276.997 jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Magelang, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.21
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Magelang 2013-2015

No	Uraian	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Jabatan eselon II			
1.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	3	5
1.2	Jumlah jabatan eselon II	29	29	29
1.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon II	10,34	10,34	17,29
2	Jabatan eselon III			
2.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	25	28	32
2.2	Jumlah jabatan eselon III	160	160	160

No	Uraian	Tahun		
		2013	2014	2015
2.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon III	15,63	17,50	20,00
3	Jabatan eselon IV			
3.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	226	234	229
3.2	Jumlah jabatan eselon IV	648	648	648
3.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon IV	34,88	26,11	35,39
4	Jumlah Pekerja Perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kab.Magelang	6.103	5.877	5.926
4.1	Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kab.Magelang	11.005	10.605	10.772
4.2	Persentase perempuan pegawai di lingkungan Pemerintah Kab.Magelang	55,47	55,42	55,01
5	Jumlah Pekerja Perempuan	273.887	275.073	276.997
6	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten (%) $(4/5)*100$	2,28	2,14	2,14

Sumber: BKD dan Bapemaspuan dan KB Kabupaten Magelang, 2016

Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada tahun 2015 adalah sebesar 0,01. Angka ini diperoleh dengan membandingkan jumlah KDRT selama tahun 2015 (yang dilaporkan) dengan jumlah seluruh rumah tangga di tahun 2015. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berikut data KDRT di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.22
Data KDRT di Kabupaten Magelang 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rumah Tangga	321.294	321.294	326.748	331.578	334.590
2.	Jumlah KDRT	47	83	52	33	36
3.	Rasio KDRT (%) $(2/1)*100$	0,015	0,026	0,016	0,010	0,011

Sumber: Bapemaspuan dan KB Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelaporan kasus KDRT pada tahun 2015 yaitu sebesar 36 kasus yang dilaporkan, dibandingkan tahun 2014 yang tercatat 33 kasus. Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga pada umumnya. Jenis kasus KDRT meliputi:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual meliputi pemaksanaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penanganan KDRT dilaksanakan melalui tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, konsultasi, serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *out reach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan ketrampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani, pemberian keterampilan serta pendampingan pemulangan).

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan capaiannya adalah 100,00%. Artinya, semua pengaduan yang terkait kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tertangani. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Traficking* (perdagangan orang). Berikut data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Magelang tahun 2011-2015:

Tabel 3.23
 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
 dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	101	140	120	82	99
2.	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	101	140	120	82	99
3.	Persentase Penyelesaian Pengaduan (%) $(2/1)*100$	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah pengaduan seiring peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu 99 kasus pengaduan. Kesemua kasus bisa ditangani semua, melalui tindakan konseling, tindakan medis berupa rujukan ke Pusat Pelayanan Terpadu/Rumah Sakit, konsultasi, serta pendampingan ke polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *out reach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani, pemberian keterampilan serta pendampingan pemulangan, *shelter* (rumah aman).

Atas komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, Kabupaten Magelang berhasil meraih penghargaan **Kabupaten Layak Anak Kategori Madya** pada tahun 2015. Prestasi ini merupakan peningkatan dari pencapaian 2012 yang meraih predikat Pratama.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 relatif menurun. Dan jika **dibandingkan dengan target RPJMD 2019**, capaian tahun 2015 telah mencapai rata-rata113,97%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I.6 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.221.365.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.188.299.845,00 atau 97,29%.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis I.6 selama ini adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan perempuan;
2. Belum optimalnya upaya perlindungan anak.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas adalah:

1. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan;

2. Pemberdayaan peran perempuan.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Strategis I.6 adalah :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.

Sasaran Strategis I.7	:	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin
------------------------------	----------	--

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Tolok ukur keberhasilan Sasaran Strategis I.7 *Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin*, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.7.
Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdg target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Buah	39	33	39	118,18	34	114,71
2.	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	Persen	14,49	15,40	31,86	206,88	20,00	159,30
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.7						162,53		137,01

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis I.7. *Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin* pada tahun 2015 adalah sebesar **162,53% (sangat baik)**.

Capaian kinerja yang meningkat signifikan adalah **PMKS yang memperoleh bantuan sosial**, dari 15,40% yang ditargetkan di awal tahun 2015, tercapai 31,86% di akhir tahun 2016. Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial, pembinaan, pelatihan dan fasilitasi pengiriman ke panti rehabilitasi.

Berikut merupakan perkembangan data capaian kinerja urusan Sosial selama 4 (empat) tahun terakhir:

Tabel 3.25
Perkembangan Data Capaian Kinerja Urusan Sosial
Di Kabupaten Magelang Tahun 2012-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015
1.	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Buah	32	31	39	39
2.	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	Persen	17,83	0,20	14,49	31,63

Sumber : Disnakersostrans Kabupaten Magelang, 2016

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan kinerja yang signifikan, terutama pada penanganan PMKS.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019, capaian kinerja pada tahun 2015 telah melampaui target akhir RPJMD 2019 dengan rata-rata capaian 137,01%.

Berikut adalah gambaran PMKS menurut jenis permasalahannya di Kabupaten Magelang selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 3.26
PMKS menurut Jenis Permasalahannya di Kabupaten Magelang,
Tahun 2013-2015

No	Jenis Permasalahan	2013			2014			2015		
		Kasus	Sudah	Belum	Kasus	Sudah	Belum	Kasus	Sudah	Belum
1.	Anak balita terlantar	182	-	182	200	-	200	200	-	200
2.	Anak terlantar	7.523	55	7.468	2.313	55	2.258	2.309	61	2.248
3.	Anak korban kekerasan	47	-	47	5	-	5	3	3	-
4.	Anak nakal	87	45	42	42	-	42	15	15	-
5.	Anak jalanan	72	36	36	13	-	13	13	13	-

No	Jenis Permasalahan	2013			2014			2015		
		Kasus	Sudah	Belum	Kasus	Sudah	Belum	Kasus	Sudah	Belum
6.	Anak cacat	2.295	-	2.295	1.167	-	1.167	1.167	311	856
7.	Wanita rawan sosial ekonomi	369	-	369	3.994	-	3.994	3.994	35	3.959
8.	Wanita korban tindak kekerasan	11	-	11	11	-	11	7	7	-
9.	Lanjut usia terlantar	3.731	90	3.641	4.592	229	4.363	4.592	584	4.008
10.	a. Penderita cacat fisik	1.713	-	1.713	2.870	100	2.770	739	44	695
	b. Tuna netra	686	-	686	1.061	-	1.061	88	-	88
	c. Tuna rungu/wicara	233	-	233	1.396	-	1.396	224	-	224
	d. Cacat mental eks psikotik/TL	3.211	-	3.211	223	-	223	223	-	223
	e. Cacat mental retardasi	1.047	-	1.047	2.326	-	2	117	-	117
	f. Cacat fisik dan mental	93	-	93	430	-	326	88	-	88
11.	Penca bekas penyakit kronis	373	-	373	373	-	373	-	-	-
12	Tuna susila	45	20	25	40	12	-	11	-	11
13.	Pengemis	126	-	126	92	-	92	14	14	-
14.	Gelandangan	7	-	7	9	-	9	9	9	-
15.	Bekas napi	294	-	294	228	-	228	228	10	218
16.	Korban penyalahgunaan NAPZA	45	-	45	34	-	34	34	-	34
17.	Keluarga miskin/Gakin	89.484	-	89.484	91.401	15.433	75.968	91.401	33.256	58.145
18.	Keluarga berumah tak layak huni	14.194	-	14.194		-	-	-	-	-
19.	Keluarga rentan	4.609	-	4.609		-	-	130	130	-
20.	Korban bencana alam	531	20	511	218	80	138	509	509	-

No	Jenis Permasalahan	2013			2014			2015		
		Kasus	Sudah	Belum	Kasus	Sudah	Belum	Kasus	Sudah	Belum
21	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	5.363	743	4.620
	Jumlah	131.008	266	130.742	110.000	15.937	96.675	112.203	35.744	76.456
	% Penanganan		0,20			14,49			31,86	

Sumber : Disnakersostrans Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS dalam 2 (dua) tahun terakhir meningkat signifikan, yang disebabkan dimasukkannya dimasukkannya bantuan kepada keluarga miskin/Gakin sejumlah 33.256 keluarga dalam komponen perhitungan penanganan PMKS. Hal ini merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH), dimana PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran Strategis I.7 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.618.039.444,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.448.604.310,00 atau 93,53%. Dengan demikian tercipta efisiensi biaya sebesar 6,47%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Strategis I.7 antara lain:

1. Keterbatasan anggaran sehingga masih banyak PMKS yang belum tertangani;
2. Masih terbatasnya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan untuk PMKS;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk fasilitasi pengiriman PMKS ke panti rehabilitasi;
4. Belum dimilikinya panti rehabilitasi ataupun rumah singgah.

Alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan di atas adalah:

1. Penambahan anggaran untuk penanganan PMKS;
2. Pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial;
3. Penambahansarana dan prasarana untuk fasilitasi pengiriman PMKS ke panti rehabilitasi;
4. Pembangunan panti rehabilitasi ataupun rumah singgah.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran Strategis I.7 adalah:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
5. Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan.

Sasaran Strategis I.8	:	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila
------------------------------	----------	--

Tolok ukur keberhasilan Sasaran Strategis I.8. *Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila* terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.8.
Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama
serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhd target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	54	38	44	115,79	38	115,79
2.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	25	18	25	138,89	18	138,89
3.	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	84,81	66,65	78,93	118,42	70,00	95,21
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.8						124,37		116,63

Tabel di atas menunjukkan bahwa Sasaran Strategis I.8. *Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila* pada tahun 2015 adalah sebesar 124,37 (sangat baik).

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya pada tahun 2015 sebanyak 44 kali. Meskipun telah melampaui target di tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 38 kali namun jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang terselenggara sebanyak 54 kali.

Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2015 sebesar 78,93%. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014, yang tercatat sebesar 84,81%. Pada tahun 2015, tercatat 551 dari 681 jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dipelihara. Dimana dari total 803 buah benda, situs, dan kawasan cagar budaya, 681 diantaranya bisa dipelihara dan dirawat. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab mengapa benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya tidak semuanya bisa diberikan biaya perawatan/pemeliharaan. Selain itu keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu kendala di dalam melakukan pengawasan terhadap benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar capaian kinerjanya bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang, seperti peningkatan anggaran, penambahan jumlah SDM yang menangani obyek tersebut, serta peningkatan kesadaran *stake holders* baik pemerintah selaku pemangku anggaran dan masyarakat akan arti pentingnya nilai benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya bagi peradaban manusia, khususnya masyarakat di Kabupaten Magelang.

Tabel 3.28
Data Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya
Di Kabupaten Magelang 2015

No	Nama	Jumlah	Satuan
1.	Candi	14	Lokasi
2.	Situs	47	Lokasi
3.	Bangunan Kolonial	64	Lokasi
4.	Museum	7	Lokasi
5.	Monumen	14	Lokasi
6.	Prasasti	1	Lokasi
7.	BCB Bergerak	551	Buah
	Jumlah	698	Lokasi/Buah

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2016

Dibandingkan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan kinerja. Hal ini disebabkan karena pengurangan anggaran, dan berkurangnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

Dibandingkan dengan target RPJMD 2019, capaian pada tahun 2015 telah melampaui target akhir yang direncanakan, dengan mencapai rata-rata 116,63%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I.8 pada tahun 2015 sebesar Rp 1.091.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.047.665.630,00 atau 96,00%.

Permasalahan dan kendala dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis I.8 antara lain:

1. Keterbatasan anggaran;
2. Kesadaran masyarakat di dalam ikut memelihara dan mempertahankan benda, situs, dan kawasan cagar budaya masih rendah.

Alternatif solusinya adalah:

1. Penambahan anggaran;
2. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan mempertahankan benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

Program-program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I.8 adalah:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Sasaran Strategis I.9	:	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan
------------------------------	----------	---

Tolok ukur keberhasilan Sasaran Strategis I.9. *Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan* terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.9.
Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Cakupan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Rata-rata)	Perse n/rerata*	16,94	16,13	18,18	112,71	19,00	95,68
2.	Cakupan Kelompok Binaan PKK (Rata-rata)	Perse n/rerata*	10,51	16,94	20,14	118,89	39,52	50,96

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
3.	Jumlah LSM	LSM	2	4	2	50,00	6	33,33
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.9						93,87		59,99

Tabel di atas menunjukkan bahwa Sasaran Strategis I.9. *Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan* pada tahun 2015 adalah sebesar 93,87 (baik).

Cakupan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2015 capaiannya sebesar 18,18. Angka ini diperoleh dengan membandingkan jumlah kelompok binaan LPM dengan jumlah LPM desa/kelurahan. Berdasarkan Lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata, bukan persentase. Data dari Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 6.763 Kelompok Binaan LPM yang tersebar pada 372 desa/kelurahan. Sehingga rata-rata kelompok binaan LPM nya adalah 18,18.

Cakupan Kelompok Binaan PKK pada tahun 2015 adalah 20,14.Seperti halnya di atas, indikator ini satuannya adalah rerata, bukan persentase, yang dihitung dengan membandingkan jumlah kelompok binaan PKK (PKK dusun, RW, RT, Dasa Wisma) sebesar 33.835 kelompok, dengan jumlah Tim Penggerak PKK sejumlah 394 Tim.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan untuk Cakupan/rata-rata pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Cakupan/rata-rata Kelompok Binaan PKK.

Dibandingkan dengan target RPJMD 2019, capaian pada tahun 2015 telah mencapai rata-rata 59,99%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I.9 pada tahun 2015 mencapai Rp 6.587.152.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.212.417.287,00 atau 94,31%.

Permasalahan dan kendala pencapaian Sasaran Strategis I.8 a antara lain:

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Masih tingginya angka kemiskinan;

3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait pengentasan kemiskinan.

Alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan di atas antara lain:

1. Peningkatan peran masyarakat dan pemberdayaan dalam pembangunan;
2. Peningkatan lembaga perekonomian masyarakat desa.

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis I.8 adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
2. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

MISI II	:	Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing
----------------	----------	--

Sasaran Strategis II.1	:	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja
-------------------------------	----------	--

Tolok ukur capaian keberhasilan Sasaran Strategis II.1 *Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja*, terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.1.
Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	74,94	75,14	75,14	100,00	76,65	98,03
2.	Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun	Persen	1,47	1,28	0,53	158,59	1,28	158,59
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	16,23	28,22	19,96	70,73	54,27	176,89

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhd target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
4.	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,06	3,28	3,84	82,93	3,02	72,85
5.	Keselamatan dan perlindungan	Persen	70,68	70,00	80,32	114,74	79,00	101,67
6.	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.1						104,50		118,01

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran II.1 *Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja* pada tahun 2015 adalah sebesar 105,50% (sangat baik).

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2015 adalah sebesar 75,14%. Angka ini sesuai dengan yang ditargetkan pada awal tahun. Berikut ini ditampilkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang berdasarkan golongan umur pada 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 3.31
Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2013-2015

Golongan Umur	2013		2014		2015	
	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja
15-19	114.851	39.535	115.379	39.457	116.061	39.488
20-24	67.330	48.982	67.580	49.714	67.830	49.980
25-29	82.503	61.988	83.878	63.786	84.610	64.594
30-34	103.535	81.979	104.070	82.409	104.607	83.245
35-39	85.174	74.299	85.607	75.267	86.041	76.050
40-44	96.864	86.899	97.774	86.821	98.608	67.827
45-49	81.189	77.024	81.617	77.481	82.047	78.059
50-54	70.198	64.048	70.801	64.899	71.409	65.622
55-59	49.682	40.237	49.700	40.196	49.813	40.357
60 +	132.372	85.237	132.719	86.300	133.389	86.841
Jumlah	883.697	660.781	889.123	666.331	894.416	672.063

Golongan Umur	2013		2014		2015	
	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja
Partisipasi Angkatan Kerja	74,77		74,94		75,14	

Sumber : Disnakersostrans Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi angkatan kerja diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Partisipasi angkatan kerja sebesar 75,14% pada tahun 2015 meningkat 0,2% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 74,94%.

Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per tahunjuga menunjukkan prestasi yang menggembirakan, dimana angka sengketa bisa ditekan menjadi 0,53% dari 1,28% yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena kesadaran pengusaha untuk melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2015 sebesar 19,96%. Capaian ini lebih rendah dari angka yang ditargetkan, yaitu sebesar 28,22%, meskipun mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 16,23%. Sebagai gambaran, berikut ini adalah data Pencari Kerja Kabupaten Magelang 2010-2015.

Tabel 3.32
Data Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Magelang, 2010-2015

Tahun	Pencari Kerja	Penempatan	Penghapusan	Sisa	% Penempatan
2010	6.739	2.952	868	2.919	43,80
2011	9.687	1.925	876	6.886	19,87
2012	4.749	2.070	827	1.852	43,59
2013	17.272	1.254	-	16.018	7,26
2014	4.141	672	-	3.469	16,23
2015	3.177	634	-	2.543	19,96

Sumber : Disnakersostrans Kabupaten Magelang, 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa meskipun persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014, namun jumlah pencari kerja pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Demikian juga dengan pencari kerja yang ditempatkan,

dari 672 calon pekerja yang ditempatkan, menjadi 634 calon pekerja yang ditempatkan pada tahun 2015.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. **Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019**, maka capaian pada tahun 2015 telah melampaui target akhir RPJMD, yaitu mencapai rata-rata 118,01% (sangat baik).

Anggaran untuk mendukung ketercapaian sasaran II.1 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 5.177.437.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.136.769.695,00 atau sebesar 79,90%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

- 1. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- 2. Keterbatasan anggaran untuk pelatihan kerja calon tenaga kerja;
- 3. Belum optimalnya usaha kerja sama penempatan dan kesempatan kerja.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

- 1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- 2. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
- 3. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Program-program pembangunan untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis II.1 adalah:

- 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Sasaran Strategis II.2	:	Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal
-------------------------------	----------	--

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Sedangkan Usaha Kecil Menengah adalah istilah yang mengacu pada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Tolok ukur capaian keberhasilan Sasaran Strategis II.2 *Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal* terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.2.
Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhd target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase koperasi aktif	Persen	77,18	77,37	82,75	106,95	78,18	105,85
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM	UKM non BPR/LKM	106.402	106.398	106.412	100,01	106.384	100,03
3.	Jumlah BPR/LKM	BPR/LKM	368	368	372	101,09	382	97,38
4.	Usaha Mikro dan Kecil	Persen	0,33	0,34	0,51	150,00	0,38	134,21
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.2						114,51		109,37

Persentase capaian Sasaran Strategis II.2 *Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal* pada tahun 2015 adalah **114,51%(sangat baik)**.

Indikator kinerja **Persentase Koperasi Aktif** pada tahun 2015 capaian kinerjanya mencapai 106,95%, karena dari 77,37% koperasi aktif yang ditargetkan pada awal tahun 2015, pada akhir tahun 2015 bisa mencapai 82,75%. Berikut ini tabel yang memuat data perkembangan persentase koperasi aktif di Kabupaten Magelang, 2010-2015 :

Tabel 3.34
Perkembangan Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Magelang 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Koperasi	545	544	549	576	577	580
2.	Koperasi Aktif	410	411	418	445	446	480
3.	Koperasi Tidak Aktif	135	133	131	131	131	100
4.	% Koperasi Aktif	75,23	75,55	76,14	77,26	77,30	82,75

Sumber : Disperinkop dan UMKM Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, persentase koperasi aktif mengalami peningkatan. Jumlah koperasi di tahun 2015 sejumlah 580 koperasi, meningkat 3 koperasi dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 577 koperasi. Demikian pula, koperasi yang aktif, meningkat dari 446 koperasi di tahun 2015 menjadi 480 koperasi. Peningkatan yang sangat signifikan ini disebabkan karena intensitas pembinaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi yang dilaksanakan oleh Disperinkop dan UMKM Kabupaten Magelang semakin meningkat.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM tahun 2015 sebesar 106.412 buah, meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 106.402 buah. Peningkatan ini disebabkan oleh sulitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal, serta moral psikologis wirausaha UMKM, harapan dan daya tahan menghadapi perubahan yang senantiasa meningkat.

Jumlah LKM/BPR pada tahun 2015 berjumlah 372 buah, yang terdiri dari 369 LKM, dan 3 BPR, yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang.

Indikator kinerja **Usaha Mikro dan Kecil** capaian kinerjanya pada tahun 2015 mencapai 150,00%. Pada tahun 2015, realisasi Usaha Mikro dan Kecil sebesar 0,51% dari 0,34% yang ditargetkan. Peningkatan ini disebabkan karena fleksibilitas UMKM dalam melakukan penyesuaian proses produksi, kemampuan UMKM dalam mengembangkan usaha dengan modal sendiri, serta bertambahnya pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan dan pengembangan usaha dengan tetap memperhatikan karakteristik wirausaha.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan, dimana semua indikator menunjukkan peningkatan realisasi.

Dibandingkan dengan target RPJMD 2019, capaian pada tahun 2015 telah mencapai rata-rata 109,37%.

Anggaran untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis II.2 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.051.659.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.010.379.140,00 atau 96,07%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih rendahnya pengelolaan manajemen koperasi;
2. Kurangnya akses permodalan;
3. Terbatasnya akses dan informasi pasar;
4. Belum adanya pusat perdagangan bersama/UMKM Center.

Alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan di atas, antara lain:

1. Pemberian pelatihan administrasi dan manajemen koperasi;
2. Kemudahan akses ke perbankan;
3. Bantuan pemerintah untuk mendapatkan akses dan informasi pasar secara lebih luas;
4. Dibangunnya pusat perdagangan bersama/UMKM Center.

Program-program untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis II.2 adalah:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Sasaran Strategis II.3	:	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah
-------------------------------	----------	---

Tolok ukur keberhasilan capaian Sasaran Strategis II.3 *Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah* terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.3.
Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	820	846	594	70,21	1.164	51,03
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	387.769.320.000	486.714.000.000	476.231.870.000	97,85	724.647.000.000	65,72
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	14,39	19,19	7,5	39,08	31,19	24,04

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	Milyar rupiah	387.769.320.000	180.000.000.000	88.462.550.000	49,15	359.000.000.000	24,64
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.3						64,07		41,36

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, capaian kinerja Sasaran Strategis II.3 *Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah sebesar 64,07 (cukup)*. Capaian dari semua indikator belum sesuai dengan target tahunan.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2015 berjumlah 594 investor. Jumlah ini turun dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 820 investor. Tabel berikut memuat data perkembangan jumlah investor PMA dan PMDN dari tahun 2009-2015:

Tabel 3.36
Perkembangan Jumlah Investor di Kabupaten Magelang 2009-2015

No	Tahun	PMA	PMDN
1.	2009	1	0
2.	2010	1	0
3.	2011	0	639
4.	2012	0	429
5.	2013	0	687
6.	2014	1	820
7.	2015	0	594

Sumber: BPMPPT Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah investor di Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2015 mengalami penurunan dari yang ditargetkan sebesar Rp 486.714.000.000,00 terealisasi Rp 476.231.870.000,00, atau 97,85%. Berikut merupakan data perkembangan investasi di Kabupaten Magelang 2009-2015:

Tabel 3.37
Perkembangan Investasi PMDN/PMA Kabupaten Magelang 2009-2015

No	Tahun	PMA	PMDN	Jumlah	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	2009	57.188.725.000	28.013.275.000	85.202.000.000	-	
2.	2010	548.225.000	92.219.171.669	92.767.396.669	7.565.396.669	8,88
3.	2011	12.000.000.000	215.339.000.000	227.339.000.000	134.571.603.331	145,06
4.	2012	-	367.748.004.294	367.748.004.294	140.409.004.294	61,76
5.	2013	-	368.528.724.000	368.528.724.000	780.719.706	0,21
6.	2014	13.000.000.000	374.769.320.000	387.769.320.000	19.240.596.000	5,22
7.	2015	-	476.231.870.000	476.231.870.000	88.462.550.000	22,81

Sumber: BPMPPPT Kabupaten Magelang, 2016

Dibandingkan dengan tahun 2014, sebagian besar capaian tahun 2015 cenderung menurun, terutama terkait penurunan jumlah investor dan penurunan nilai realisasi investasi.

Dibandingkan dengan target RPJMD 2019, capaian pada tahun 2015 masih jauh dari yang ditargetkan, yaitu rata-rata 41,36%.

Anggaran untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis II.3 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 759.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 727.269.550,00 atau 95,77%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya kewenangan pelayanan perijinan penanaman modal;
2. Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN;
3. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan di atas antara lain:

1. Penyusunan regulasi di bidang pelayanan perijinan penanaman modal yang ramah investor;
2. Peningkatan iklim investasi di daerah;
3. Peningkatan pelayanan administrasi investasi.

Program-program pembangunan untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis II.3 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Sasaran Strategis II.4	:	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat
-------------------------------	----------	--

Sasaran Strategis II.4 *Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat* terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.38

Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.4.

Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Ketersediaan pangan utama beras	Persen	216,87	188,00	218,04	115,98	188,10	115,92
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	-	92,30	90	85,90	95,44	93,10	92,27
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.4						105,71		104,10

Tabel di atas menunjukkan persentase capaian kinerja sasaran strategis II.4 *Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat* pada tahun 2015 adalah sebesar **105,71 (sangat baik)**.

Ketersediaan bahan pangan (beras) pada tahun 2015 mengalami peningkatan, menjadi 218,04. Namun **Skor Pola Pangan Harapannya (PPH)** mengalami penurunan dari yang ditargetkan, menjadi 85,90.

Berikut data perkembangan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.39

Data Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) dan Skor PPH Kabupaten Magelang 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ketersediaan pangan utama beras	Persen	179.480	205.535	210.902	205.506	218.041
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	-	80,90	82,00	83,70	92,30	85,90

Sumber : BPPKP Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Magelang senantiasa mengalami peningkatan. Namun skor PPH nya justru mengalami penurunan menjadi 85,90 di tahun 2015.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2014 mengalami peningkatan untuk Ketersediaan Pangan Utama Beras, sedangkan PPH nya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada pola konsumsi masyarakat yang tidak sesuai standar gizi.

Dibandingkan dengan target RPJMD 2019, capaian pada tahun 2015 rata-ratanya telah mencapai 105,22%. Ketersediaan pangan utama beras telah melampaui target akhir RPJMD, sedangkan Skor PPH nya masih jauh dari harapan.

Jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah, maka capaian urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.40
Perbandingan Capaian Urusan Ketahanan Pangan
Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Magelang	Prov. Jawa Tengah	Susenas
1.	Ketersediaan pangan utama beras	Persen	218.041	6.562.656	-
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	-	85,90	91,45	84,00

Sumber : BPPKP Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa skor PPH di Kabupaten Magelang masih di bawah rata-rata skor PPH di Jawa Tengah.

Anggaran untuk mendukung ketercapaian Sasaran II.4 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 531.930.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 511.190.753,00 atau 96,10%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kesulitan dalam mengubah pola konsumsi masyarakat, dari beras ke non beras;
2. Belum optimalnya upaya-upaya pengamanan pangan.

Alternatif solusinya adalah:

1. Kampanye dan sosialisasi tentang diversifikasi pangan secara lebih intensif;
2. Mengoptimalkan upaya-upaya pengamanan pangan, seperti uji kandungan gizi pangan.

Program yang mendukung ketercapaian Sasaran Strategis II.4 adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Sasaran Strategis II.5	:	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
-------------------------------	----------	---

Tolok ukur capaian keberhasilan Sasaran Strategis II.5 *Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* terdiri dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.5.
Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% realisasi terhdg target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar							
1.	Produktivitas Padi	Ku/Ha	60,07	60,03	62,11	103,46	60,10	103,34
2.	Produksi Padi	Ton/Th	345.883	355.250	366.981	103,30	355.676	103,18
3.	Produktivitas Jagung	Kw/Ha	57,31	59,20	57,74	97,53	59,30	97,37
4.	Produksi Jagung	Ton/th	62.869	74.217	67.124	90,44	74.337	90,30
5.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	24,76	23,47	24,10	102,68	20,03	120,32
6.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	Persen	73,84	73,37	73,35	99,97	71,84	102,10
7.	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	Persen	7,08	7,19	7,30	101,53	7,73	94,44

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% realisasi terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
8.	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	2,97	12,19	12,28	100,74	13,09	93,81
9.	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	24,77	18,00	19,12	106,67	14,9	128,86
	Produksi Hewan ternak							
10.	Sapi potong	Kg	1.779.957	1.720.357	1.781.147	103,53	1.862.169	95,65
11.	Kerbau	Kg	564	499	564	113,03	541	104,25
12.	Kambing	Kg	760.663	732.855	763.706	104,21	793.265	96,27
13.	Domba	Kg	1.066.882	1.030.666	1.072.267	104,04	1.115.626	96,11
	Produksi Hewan Unggas							
14.	Ayam Pedaging	Ton	9.144.723	9.198.833	9.181.363	99,81	9.957.100	92,21
15.	Ayam Ras Petelur	Ton	936.393	941.933	941.675	99,97	1.019.500	92,37
16.	Ayam Buras	Ton	1.138.812	1.145.551	1.139.035	99,43	1.239.980	91,86
17.	Itik	Ton	86.257	86.939	86.891	99,94	94.106	92,33
18.	Sapi Perah	Liter	676.481	689.335	709.155	102,88	746.158	95,04
	Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)							
19.	Daging	gr/kap/hr	5,56	5,50	5,82	105,82	6,20	93,87
20.	Telur	gr/kap/hr	3,72	3,75	3,90	104,00	4,65	83,87
21.	Susu	gr/kap/hr	0,03	0,04	0,02	50,00	0,11	18,18
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.5						99,66		94,56

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis II.5 *Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* pada tahun 2015 adalah sebesar **99,66% (baik)**.

Produktivitas Padi pada tahun 2015 adalah sebesar 62,11 Ku/Ha, meningkat 2,08 Ku/Ha dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 60,07 Ku/Ha. Meningkatnya produktivitas padi di Kabupaten Magelang disebabkan

berkurangnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tahun 2015, penambahan luasan tanam, kegiatan pengendalian OPT, penggunaan pupuk yang sesuai dengan anjuran, adanya bantuan pupuk dan benih kepada kelompok tani, pelatihan SL-PTT Padi dan SRI (*Sistem Rice Intensification*), serta pembinaan/pendampingan yang intensif kepada kelompok tani, termasuk sosialisasi sistem tanam jajar legowo.

Program intensifikasi dan kelembagaan petani hortikultura yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani dan meningkatkan nilai tawar komoditas pertanian. Distanbunhut Kabupaten Magelang juga melakukan pembinaan dan pendampingan di dalam pemberian sertifikasi padi organik yang merupakan produk unggulan lokal. Tabel berikut menunjukkan data luas panen, produktivitas, dan produksi padi di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 3.42
Data Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Sawah
Di Kabupaten Magelang 2010-2015

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
2010	54.767	59,83	327.650
2011	50.504	59,82	302.090
2012	57.810	59,84	345.933
2013	59.364	59,79	354.966
2014	57.579	60,07	345.883
2015	59.084	62,11	366.981

Sumber: Distanbunhut Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan luasan panen padi, dari 57.579 Ha di tahun 2014 menjadi 59.084 Ha. Demikian juga dengan produksi padi, meningkat dari 345.883 Ton menjadi 366.981 Ton di tahun 2015. Produktivitas padi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Produktivitas jagung pada tahun 2015 sebesar 57,74 Ku/Ha. Meskipun angkanya meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 57,31 Ku/Ha, namun capaian ini lebih rendah dari angka yang ditargetkan pada awal tahun, yaitu sebesar 59,20 Ku/Ha. Demikian juga dengan angka produksi jagung, capaiannya sebesar 67.124 Ton lebih rendah dari angka yang ditargetkan sebesar 74.217 Ton, dengan luasan panen sebesar 11.625 Ha. Hal ini disebabkan karena jagung yang ditanam petani sebagian besar merupakan jagung lokal, bukan hibrida. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas

padi, maka dilaksanakan upaya sosialisasi dan pemberian bantuan benih jagung hibrida, pupuk, sarana dan prasarana lainnya.

Cakupan Bina Kelompok Petani mencatatkan angka 19,12% yang telah dibina. Data dari BPPKP Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 2.719 Kelompok Petani di Kabupaten Magelang, 520 kelompok diantaranya telah dibina. Perkembangan cakupan bina kelompok dalam 5 (lima) tahun terakhir terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.43
Data Cakupan Bina Kelompok Petani
Di Kabupaten Magelang 2011-2015

Tahun	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah yang Dibina	% yang dibina
2011	2.085	566	27,15
2012	2.128	612	28,76
2013	2.196	578	26,32
2014	2.245	556	24,77
2015	2.719	520	19,12

Sumber : BPPKP Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kelompok petani terus mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan cakupan bina kelompok petani, dari 24,77% di tahun 2014 menjadi 19,12% di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah penyuluh pertanian, sehingga frekuensi pembinaan menjadi berkurang.

Pada sub sektor peternakan, Kabupaten Magelang pada tahun 2015 mencatat beberapa kemajuan, dimana produksi hewan ternak, yang terdiri dari sapi potong, kerbau, kambing dan domba, mengalami peningkatan produksi dari yang ditargetkan pada awal tahun 2015. Penurunan terjadi pada produksi hewan unggas, yang terdiri dari ayam pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, dan itik. Hal ini disebabkan karena tingginya harga pakan unggas yang berupa konsentrat, menyebabkan peternak berhenti memproduksi sementara waktu, hanya peternak yang menjalin kemitraan usaha yang masih tetap bertahan.

Angka konsumsi protein susu mengalami penurunan menjadi 0,02 gr/kap/hari karena sentra produksi susu di Kabupaten Magelang masih dalam masa peralihan, dari budidaya sapi perah jantan untuk penggemukan, menjadi budidaya sapi perah betina sehingga produksi susu belum optimal.

Dibandingkan tahun 2014, capaian kinerja pada Sasaran Strategis II.5 yang merupakan urusan Pertanian di tahun 2015 rata-rata mengalami

peningkatan. **Dibandingkan dengan target RPJMD 2019**, capaian pada tahun 2015 rata-rata telah mencapai 94,56%.

Jika dibandingkan dengan capaian provinsi, maka capaian pada urusan Pertanian di Kabupaten Magelang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.44
Perbandingan Capaian Urusan Pertanian
Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Magelang	Prov. Jawa Tengah
1.	Produktivitas Padi	Ku/Ha	62,11	60,25
2.	Produksi Padi	Ton/th	366.981	11.301.422
3.	Produktivitas Jagung	Kw/ha	57,74	59,18
4.	Produksi Jagung	Ton/th	67,124	3.212.391

Sumber : Distanbunhut Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas padi di Kabupaten Magelang pada tahun 2015 capaiannya lebih tinggi di bandingkan rata-rata pada tingkat provinsi Jawa Tengah. Sedangkan produktivitas jagung capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian provinsi Jawa Tengah.

Anggaran untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis II.5 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 35.019.234.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.514.598.930,00 atau 27,17%. Sedikitnya penyerapan anggaran karena sebagian besar anggaran berupa kegiatan hibah dimana sesuai dengan peraturan terbaru, kelompok penerima harus berbadan hukum. Hal inilah yang menjadi kendala pencairan anggaran.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah :

1. Semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan pangan masyarakat;
2. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke non pertanian;
3. Rendahnya daya saing produk-produk pertanian;
4. Rendahnya akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;
6. Belum optimalnya pengembangan potensi peternakan.

Alternatif solusi untuk permasalahan-permasalahan di atas antara lain:

1. Diversifikasi pangan;
2. Pengetatan aturan/kebijakan yang terkait dengan izin pengeringan lahan;
3. Peningkatan kualitas prduk-produk pertanian;

4. Fasilitasi akses pasar untuk komoditas pertanian bagi petani dan kelompok petani;
5. Penguatan kelembagaan petani;
6. Mengoptimalkan pengembangan potensi peternakan.

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis II.5 adalah:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

Sasaran Strategis II.6	:	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan
-------------------------------	----------	--

Tolok ukur capaian keberhasilan Sasaran Strategis II.6 *Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan* terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.6.
Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% cadangan terhdpt target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Produksi Perikanan (Benih)	Juta Ekor	1.202,66	1.100	1.269,41	115,40	2.000	63,47
2.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	15.488,992	14.500	16.686,11	115,08	18.000	92,70
3.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	272,70	225,30	285,30	126,63	263,57	108,24
4.	Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	14,59	14,50	14,59	100,62	15,75	92,63
5.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	Persen	2,23	2,42	2,38	98,35	2,68	88,81
Persentase Capaian Kinerja sasaran Strategis II.6						111,22		89,17

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.6 *Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan* pada tahun 2015 adalah sebesar **111,22% (sangat baik)**.

Produksi perikanan benih, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut data produksi perikanan dan konsumsi ikan selama 6 (enam) tahun di Kabupaten Magelang.

Tabel 3.46
Data Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Magelang 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Produksi perikanan benih (ekor)	454.913.000	602.761.400	752.098.700	1.014.517.500	1.202.663.380	1.269.407.850
2.	Produksi perikanan lauk/budidaya (Kg)	4.448.000	3.590.200	4.712.386	8.307.800	15.488.991,70	16.686.110
3.	Angka Konsumsi Protein Ikan (Kg/Kap/Th)	12,66	12,50	12,88	13,35	14,59	14,51

Sumber: *Dispeterikan Kabupaten Magelang, 2016*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa indikator pada urusan Kelautan dan Perikanan trend nya meningkat, kecuali angka konsumsi ikan yang mengalami penurunan di banding dengan tahun sebelumnya, yaitu 14,51 kg/kap/th di tahun 2015 dari semula 14,59 kg/kap/th di tahun 2014. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dispeterikan selalu mengupayakan peningkatan konsumsi ikan di masyarakat, antara lain melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, Peningkatan Mutu Olahan Hasil Perikanan dan PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam mengonsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein hewani, dan untuk mengenalkan variasi hasil olahan produk perikanan.

Kebijakan yang dijalankan oleh Dispeterikan Kabupaten Magelang antara lain Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, serta Peningkatan Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Payau dan Tawar. Selain itu, keberhasilan ini didukung oleh adanya program dan kegiatan yang berasal dari:

1. Bantuan APBD Provinsi berupa pelatihan, bantuan benih dan pakan;
2. Bantuan APBN melalui Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) berupa bantuan benih/induk, pakan dan sarana prasarana untuk paket pembesaran dan pembenihan;

3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berasal dari Bank Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan pembuatan pakan dan bantuan alat pembuat pakan;
4. FEDEP (BAPPEDA) berupa pelatihan peningkatan kelembagaan pada kluster perikanan.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 rata-rata mengalami peningkatan yang signifikan. **Dibandingkan dengan target RPJMD 2019**, capaian pada tahun 2015 rata-rata 89,17%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II.6 yang merupakan urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 sebesar Rp 3.845.300.000,00 dengan realisasi sebesar 3.761.371.550,00 atau 97,82%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

1. Kurang optimalnya usaha pembenihan ikan yang menyediakan benih ikan berkualitas dengan prinsip Good Breeding Practice;
2. Kurangnya akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminan kelangsungan usaha perikanan;
3. Belum dimanfaatkannya sumber daya perikanan secara optimal;
4. Kurang berkualitasnya produk hasil perikanan karena lemahnya penerapan Good Handling Practice dan Good Manufacturing Practice.

Alternatif solusinya adalah :

1. Penyediaan induk ikan berkualitas;
2. Meningkatkan akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminan kelangsungan usaha perikanan;
3. Mengoptimalkan sumber daya perikanan;
4. Mengoptimalkan penerapan *Good Handling Practice* dan *Good Manufacturing Practice* untuk meningkatkan kualitas mutu produk hasil perikanan.

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis II.6 adalah:

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
3. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar.

Sasaran Strategis II.7	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan
------------------------	---	---

Tolok ukur capaian keberhasilan Sasaran Strategis II.7 *Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan* terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.47
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.7.
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdpt target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,50	10,10	13,74	136,04	9,98	137,68
2.	Ekspor bersih perdagangan	Juta US\$	100.5	88,2	93,1	105,56	89	104,61
3.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	Persen	2,26	3,03	5,41	178,55	13,55	39,93
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.7						140,05		94,07

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.7 *Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan* pada tahun 2015 adalah sebesar **140,05% (sangat baik)**.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 10,10% yang ditargetkan, tercapai 13,74% pada akhir tahun 2015. Begitu pula dengan **Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal** yang meningkat menjadi 5,41% dari yang ditargetkan 3,03%. Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang melaksanakan pembinaan pedagang pasar, pasar desa, dan PKL/asongan berupa sosialisasi manajemen perdagangan, dan pemberian bantuan sarana prasarana bagi PKL.

Ekspor Bersih Perdagangan capaian kinerjanya pada tahun 2015 adalah 136,04%, namun realisasinya mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 dimana ekspor bersih perdagangan Kabupaten Magelang tercatat \$100.528.807,73. Penurunan di tahun 2015 ini disebabkan karena ekspor ke Cina mengalami penurunan, sebagai imbas dari kelesuan pasar dan penurunan nilai mata uang Yuan.

Sumbangan terbesar ekspor bersih perdagangan berasal dari sektor agropolitan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.48
Data Komoditas Ekspor
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2015 (\$)

No	Komoditas	2013	2014	2015
1.	Kayu Olahan	83.351.112,19	92.095.069,96	74.155.084,10

No	Komoditas	2013	2014	2015
2.	Kulit Samak	2.983.081,04	3.108.911,36	1.968.313,78
3.	Alat Rumah Tangga dari Kayu	-	-	-
4.	Daun Pakis/Bunga Potong	1.208.855,00	1.127.993,50	1.240.556,90
5.	Keripik Singkong	108.416,25	132.997,50	120.082,11
6.	Meubel	1.949.891,63	4.732.330,44	3.983.039,87
7.	Benang Tekstil	197.815,80	257.627,38	84.543,52
8.	Sisik Ikan	396.514,37	-	282.262,50
9.	Kerajinan Kayu	8.448,25	90.445,86	19.500,00
10.	Kerajinan Batu	40.000,00	32.333,33	238.124,58
11.	Jamu	50.941,44	228.765,97	284.090,89
12.	Kerajinan Kaleng Bekas	8.450,00	22.558,31	76.153,83
13.	Agropolitan	368.670,00	377.687,67	11.625.592,83
14.	Industri Pemadam	-	165.954,24	141.982,93
15.	Kerajinan Serat Alam	-	-	90.979,58
	Jumlah Eksport	90.672.195,97	102.372.685,52	94.310.307,20
	Jumlah Import	2.367.953,18	1.843.877,79	1.233.499,55
	Jumlah Ekport Bersih	88.304.242,79	100.528.807,73	93.076.807,65

Sumber : Disdagsar Kabupaten Magelang, 2016

Tujuan ekspor dari Kabupaten Magelang meliputi Korea, Jepang, Hongkong, Thailand, India, Singapura, Australia, Malaysia, Belanda, Inggris, Amerika, Taiwan, China, Arab Saudi dan Belgia. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Magelang diantaranya adalah pembinaan yang intensif terhadap usaha-usaha yang berorientasi ekspor, monitoring dan koordinasi dengan eksportir, serta ditemukannya komoditas baru yang berorientasi ekspor.

Pada tahun 2015 ada jenis barang ekspor baru, berupa kerajinan serat alam yang berasal dari pelepah daun pisang atau bahan berserat lainnya, yang dijadikan karpet, *wallpaper*, dan tirai, dengan tujuan negara Amerika. Daerah penghasil kerajinan serat alam ini dari daerah Bandongan. Sedangkan produk agropolitan yang dieskpor adalah salak, manggis, sayuran, teh, dan beras IG rendah, yang berasal dari daerah Pakis, Srumbung, dan Salaman dengan tujuan negara China, Australia, Singapura, Jerman, dan Caledonia.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian tahun 2015 banyak yang mengalami penurunan, akibat perekonomian dunia yang lesu, dan berimbas ke Indonesia. **Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019**, capaian pada tahun 2015 telah mencapai rata-rata 94,07%.

Anggaran untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis II.7 yang merupakan urusan Perdagangan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 33.613.853.185,00 dengan realisasi sebesar 27.226.627.620,00 atau sebesar 81,00%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- 1. Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai;
- 2. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pameran perdagangan internasional di Jakarta;
- 3. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pembinaan kepada kelompok pedagang/usaha informal.

Solusi alternatifnya adalah:

- 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kegiatan ekonomi dan pengembangan perdagangan, terutama revitalisasi pasar tradisional, sehingga mendorong pertumbuhan produk unggulan local;
- 2. Meningkatkan anggaran untuk mengikuti pameran perdagangan internasional di Jakarta sehingga produk-produk unggulan dari Kabupaten Magelang bisa dikenal;
- 3. Meningkatkan anggaran untuk melaksanakan pembinaan kepada kelompok pedagang/usaha informal sehingga cakupan pembinaan kelompok pedagang/usaha informal bisa senantiasa meningkat.

Program-program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II.7 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan;
- 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.

Sasaran Strategis II.8	:	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah
-------------------------------	----------	--

Tolok ukur capaian keberhasilan Sasaran Strategis II.8 *Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah* terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.49
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.8
Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi
Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	2,79	2,80	3,70	132,14	16,83	21,98
2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	18,59	18,27	18,80	102,90	17,95	104,74
3.	Pertumbuhan Industri	Persen	3,76	3,76	2,95	78,33	3,76	78,33
Persentase Capaian Kinerja Urusan Perindustrian						104,46		68,35

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis II.8 *Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah* pada tahun 2015 adalah sebesar **104,46% (sangat baik)**.

Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2015 sebesar 3,70%. Disperinkop dan UMKM Kabupaten Magelang melakukan pembinaan kepada kelompok pengrajin, berupa pelatihan desain produk, pelatihan teknis, dan lain-lain.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Magelang pada tahun 2015 adalah sebesar 2,95%. Angka ini di bawah angka yang ditargetkan sebesar 3,76%.

Dibandingkan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan. **Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019** capaian kinerjanya baru mencapai rata-rata 68,35%. Indikator kinerja yang capaiannya masih jauh dari angka target adalah Cakupan Bina Kelompok Pengrajin, yaitu sebesar 21,98%. Namun, indikator ini capaiannya cenderung meningkat setiap tahun.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II.8 yang merupakan urusan Perindustrian pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.394.339.500,00 dengan realisasi sebesar 1.281.639.510,00 atau 91,92%. Dengan capaian kinerja yang melebihi 100,00%, maka tercipta efisiensi biaya sebesar 8,08%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya kapasitas SDM di level manajerial dan menurunnya kualitas SDM terampil di level proses produksi;
2. Kurangnya daya saing produk industri kecil;

3. Kurang adanya keterkaitan antar rantai nilai (bahan baku, proses produksi, dan promosi/pemasaran).

Alternatif solusi pada permasalahan di atas adalah dengan mengembangkan industri kecil berbasis potensi lokal (SDM, bahan baku, dan budaya) dengan pendekatan kearifan lokal.

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis II.8 antara lain adalah:

- 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- 4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Sasaran Strategis II.9	:	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah
-------------------------------	----------	--

Tolok ukur capaian keberhasilan Sasaran Strategis II.9 Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.50
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.9
Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Kunjungan Wisata Manca Negara	Orang	301.909	429.129	253.358	59,04	860.549	29,44
2.	Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	3.921.463	4.410.074	4.007.198	90,86	6.594.051	60,77
3.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	Persen	8,82	5.83	4,75	81,48	6,89	68,94
Persentase Capaian Kinerja Urusan Pariwisata						77,13		53,05

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis II.9 *Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah* pada tahun 2015 adalah sebesar **77,13% (cukup)**.

Kunjungan Wisata Manca Negara pada tahun 2015 sebesar 253.358 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 301.909

orang. Sedangkan **Kunjungan Wisata Nusantara** pada tahun 2015 sebesar 4.007.198 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 3.921.463 orang.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Magelang banyak melakukan kegiatan-kegiatan intensifikasi potensi wisata dan promosi dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga seperti biro-biro perjalanan, ataupun menyelenggarakan kegiatan seperti *Road Show* dan *Java Promo*. Berikut adalah data kunjungan wisata selama 7 tahun terakhir.

Tabel 3.51
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Magelang 2009-2015

No	Tahun	Jumlah	Peningkatan (%)
1.	2015	4.007.198	2,18
2.	2014	3.921.463	0,30
3.	2013	3.909.593	10,43
4.	2012	3.540.329	33,89
5.	2011	2.644.194	-9,58
6.	2010	2.924.307	-6,67
7.	2009	3.133.172	

Sumber : Disparbud Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan terjadi peningkatan kunjungan wisata, sebesar 2,18% pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan dan pembangunan fasilitas di Taman Rekreasi Mendut dan Telaga Bledar.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2015 adalah 4,75%, menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang sebesar 8,82%.

Sedangkan jika diukur melalui PAD, maka sumbangan sector pariwisata terhadap PAD, bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.52
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Magelang 2010-2015

Thn	PAD	Sektor Pariwisata						%
		Retribusi Obyek Par.	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Parkir	Pajak Hiburan	Total	
2010	76.057.772.876	2.470.714.495	4.640.457.948	1.697.703.056	191.030.800	131.874.645	9.131.780.944	12,01
2011	90.458.918.422	2.636.802.150	4.377.288.220	1.812.943.168	194.023.400	160.343.924	9.181.400.862	10,15
2012	123.722.781.349	4.033.206.295	5.769.718.741	3.135.782.354	433.045.201	271.746.797	13.643.499.388	11,03
2013	173.253.651.914	4.124.431.035	6.641.038.262	3.593.410.841	545.507.650	447.774.200	15.352.161.988	8,86
2014	242.112.665.092	4.089.796.544	9.415.372.689	4.828.337.167	553.108.536	765.241.112	19.651.856.048	8,12
2015	261.542.589.723	3.745.264.115	10.267.691.157	6.635.540.006	693.059.250	1.509.905.071	22.851.459.599	8,74

Sumber : DPPKAD Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa total pendapatan dari sektor pariwisata senantiasa mengalami peningkatan selama 6 (enam) tahun terakhir, persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami peningkatan, menjadi 8,74% dari semula 8,12% pada tahun 2014.

Dibandingkan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 cenderung mengalami penurunan capaian kinerja. **Dibandingkan dengan target RPJMD 2019**, capaian pada tahun 2015 baru mencapai rata-rata 53,05%

Berikut gambaran kegiatan untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Magelang selama tahun 2015:



Keterangan Photo:
Aneka ragam Pertunjukan seni untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Magelang tahun 2015

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II.9 yang merupakan urusan Pariwisata pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 3.919.190.030,00 dengan realisasi Rp 3.715.619.490,00 atau 94,81%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

1. Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata;
2. Kurangnya SDM pelaku pariwisata;
3. Kurangnya manajemen pengelolaan pariwisata.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas antara lain:

1. Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata, kelembagaan dan SDM kepariwisataan;
2. Peningkatan promosi kepariwisataan;
3. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif.

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran II.9 adalah:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Pengembangan Kemitraan.

MISI III	:	Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah
-----------------	----------	---

Sasaran Strategis III.1	:	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru
--------------------------------	----------	--

Tolok ukur keberhasilan Sasaran Strategis III.1 *Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru* terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil pengukuran seagai berikut:

Tabel 3.53

Capaian Kinerja Sasaran Strategis III.1.

Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	65,32	68,53	68,52	99,99	69,73	98,26
2.	Luas jaringan irigasi	Persen	30,11	30,57	30,57	100,00	30,57	100,00
3.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	56,27	58,10	59,58	102,55	67,40	88,40
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis III.1						100,85		95,55

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis III.1 *Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru* pada tahun 2015 adalah **100,85 (sangat baik)**.

Capaian indikator kinerja **Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik** pada tahun 2015 adalah sebesar 99,99%. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah 608,34 Km, atau 68,52%. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2014, dimana panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 579,935 Km atau 65,32% dari total panjang jalan kabupaten. Berikut data mengenai kondisi jalan kabupaten periode 20010-2015.

Tabel 3.54
 Panjang Jalan Menurut Keadaannya di Kabupaten Magelang 2010-2015

No	Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi							
			Baik	%	Sedang	%	Rusak Ringan	%	Rusak Berat	%
1.	2010	641,11	453,290	70,70	147,77	23,05	17,4	2,71	29,65	4,62
2.	2011	836,835	533,1618	63,71	191,87	22,93	90,1082	10,77	21,695	2,59
3.	2012	836,835	544,5618	65,07	191,87	22,93	87,1082	10,41	13,295	1,59
4.	2013	836,835	577,6118	69,02	168,845	20,18	77,8832	9,31	12,495	1,49
5.	2014	887,83	579,935	65,32	195,67	22,04	91,015	10,25	21,205	2,39
6.	2015	887,83	608,340	68,52	170,02	19,15	88,020	9,91	21,210	2,39

Sumber : DPU dan ESDM Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi jalan baik mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015. Namun, kondisi jalan rusak berat tidak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena tingkat layan jalan Kabupaten Magelang yang cukup tinggi tidak sepadan dengan kelas jalan yang ada. Sebagai contoh kondisi jalan di sekitar Gunung Merapi mengalami kerusakan lebih cepat dikarenakan beban kendaraan yang melewatinya tidak sebanding dengan kelas jalan yang ada. Di satu sisi, anggaran pemeliharaan jalan kabupaten terbatas. Artinya, pemeliharaan jalan tidak sebanding dengan kerusakan jalan yang terjadi.

Status ruas jalan di Kabupaten Magelang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/180/KEP/125/2015tentang Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Bupati Magelang ini, terdapat 204 ruas jalan yang tersebar di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang.

Faktor yang paling berpengaruh pada kerusakan jalan adalah kondisi jalan kabupaten yang relatif sempit dengan lebar rata-rata 3 meter dan beban layan kendaraan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ada. Di samping itu umur jalan kabupaten yang sudah cukup lama tidak ditingkatkan (*overlay*) untuk mengembalikan kondisi jalan. Kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Magelang di antaranya terkelupas/segregasi, retak buaya, aus dan retak alur, *pothole*/lubang, dan *sliding*. Kegiatan yang pemeliharaan dan peningkatan jalan yang dilaksanakan selama ini adalah *overlay*/peningkatan jalan dan pelebaran jalan.

Kegiatan penanganan jalan meliputi pemeliharaan rutin/berkala, peningkatan kelas jalan, pelebaran, dan pengamanan. Pada tahun ini, pemeliharaan rutin jalan dapat dilaksanakan dengan total panjang 356 km

yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk pemeliharaan berkala, yaitu penanganan kerusakan jalan berupa pengaman jalan dan saluran terdapat 12 paket pemeliharaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang.

Berikut ini adalah rincian kegiatan penanganan jalan :

1. Peningkatan Jalan Kabupaten : 58 paket 58 lokasi
 - Penetapan dengan total 48 paket sebesar Rp 25.428.628.000,00.
 - Perubahan dengan total 10 paket sebesar Rp 1.995.444.000,00.
 - Peningkatan Jalan Kabupaten (SILPA DAK) dengan total 2 paket sebesar Rp 233.013.000,00.
2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten : 23 paket 23 lokasi
 - Penetapan dengan total 12 paket sebesar Rp 2.283.204.000,00.
 - Perubahan dengan total 11 paket sebesar Rp 2.194.808.000,00.
3. Bantuan Kabupaten/ Kota dari APBD Prov. Jateng Tahun Anggaran 2015
 - Penetapan dengan total 5 paket sebesar Rp 8.970.478.700,00.
 - Perubahan dengan total 39 paket sebesar Rp 9.134.053.000,00.
4. Pemeliharaan Rutin Jalan tersebar di wilayah Kabupaten Magelang
 - Penetapan dengan total panjang 250 km sebesar Rp 9.582.000.000,00.
 - Perubahan dengan total panjang 106 km sebesar Rp 4.052.013.000,00.

Berikut adalah gambaran kegiatan penanganan jalan selama tahun 2015:



Luas jaringan irigasi tidak mengalami perubahan, dimana pada tahun 2015 masih seluas 30,57%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DPU dan ESDM Kabupaten Magelang, hingga tahun 2015 terdapat 993 daerah irigasi, dengan luas areal 35.693,45 Ha. **Persentase luas irigasi kabupaten baik** pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 59,58%, meningkat sebesar 3,31% dibandingkan dengan tahun 2014 dengan luasan 56,27% irigasi dalam kondisi baik. Berikut data kondisi irigasi di Kabupaten Magelang dalam 8 (delapan) tahun terakhir:

Tabel 3.55
Kondisi Irigasi di Kabupaten Magelang, 2008-2015

No	Tahun	Luas Sawah Baku (Ha)	Kondisi Jaringan Irigasi						Keterangan
			Baik	%	Rusak Sedang	%	Rusak Berat	%	
1.	2008	37.836,98	16.696,68	44,13	13.906,06	36,75	7.041,24	18,61	Luas areal baku sesuai Kepmen PU No 390 Tahun 2003
2.	2009	37.836,98	15.956,96	42,17	17.920,62	47,36	3.959,40	10,46	Luas areal baku sesuai Kepmen PU No 390 Tahun 2004
3.	2010	37.836,98	15.962,90	42,19	6.909,04	18,26	14.965,04	39,55	Luas areal baku sesuai Kepmen PU No 390 Tahun 2005
4.	2011	37.836,98	16.295,44	43,07	7.472,70	19,75	14.068,84	37,18	Luas areal baku sesuai Kepmen PU No 390 Tahun 2006
5.	2012	37.836,98	17.489,82	46,22	7.455,32	19,70	12.891,84	34,07	Luas areal baku sesuai Kepmen PU No 390 Tahun 2007
6.	2013	35.693,45	18.546,16	51,96	6.284,32	17,61	10.862,97	30,43	Luas areal baku sesuai dengan hasil verifikasi usulan Penetapan Status Daerah Irigasi sebagai bahan Revisi Kepmen PU
7.	2014	35.693,45	20.085,45	56,27	6.707,00	18,79	8.901,00	24,94	
8.	2015	35.693,45	21.267,45	59,58	6.792,00	19,03	7.634,00	21,39	

Sumber : DPU ESDM Kabupaten Magelang, 2016

Pengelolaan irigasi dilakukan melalui kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi, Penanggulangan, Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Akibat Bencana Alam dan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air. Sumber dana berasal dari : Dana Alokasi Khusus (DAK), PAD, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, SILPA, serta Dana Hibah. Berikut adalah beberapa dokumentasi pengelolaan irigasi selama tahun 2015:



Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian urusan pekerjaan umum menunjukkan prestasi yang menggembirakan, dimana terjadi peningkatan realisasi target pada semua indikator kinerja.

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum sampai dengan tahun 2015, jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019 telah mendekati target, yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 95,55%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis III.1 yang merupakan urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2015 sebesar Rp 134.257.475.514,00 dengan realisasi sebesar Rp 115.907.996.374,00 atau 86,33%, atau tercipta efisiensi sebesar 13,77%. Proporsi terbesar dari anggaran itu diperuntukan untuk penanganan jalan dan jembatan, yaitu sebesar 82,19% dari total anggaran.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis III.1 antara lain:

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan;
2. Adanya kerusakan jalan dan jembatan;
3. Rasio jaringan irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan bangunan irigasi akibat dari letusan Gunung Merapi;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.

Alternatif solusinya adalah:

1. Pembangunan, pemberdayaan, pemerataan, dan aksesibilitas pada infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi
2. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan konservasi sumberdaya alam secara konsisten dan berkelanjutan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan
3. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Program-program pembangunan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis III.1 adalah :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
3. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

7. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
9. Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
11. Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi;
12. Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air.

Sasaran Strategis III.2	:	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat
--------------------------------	----------	---

Penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang didahului proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/498/KEP/25/2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Magelang.

Tolok ukur keberhasilan Sasaran Strategis III.2 *Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat* terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.56

Kinerja Sasaran Strategis III.2.

Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Rumah tangga bersanitasi	Persen	76,00	80,40	75,97	94,49	84,20	90,22
2.	Lingkungan pemukiman kumuh	Persen	2,74	2,79	0,29	189,61	2,45	188,16
3.	Rumah layak huni	Persen	53,04	65,00	53,13	81,74	85,00	62,51
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis III.2						121,95		113,63

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Sasaran III.2 *Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat* pada tahun 2015 adalah **121,95% (sangat baik)**.

Luasan lingkungan permukiman kumuh mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 2,79% yang ditargetkan, pada akhir tahun 2015 tercatat hanya 0,29% yang merupakan lingkungan kumuh. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah permukiman. Untuk mengukur keberhasilan dibidang pengurangan kawasan kumuh maupun luasan lingkungan permukiman kumuh, digunakan satu ukuran, yaitu kawasan permukiman kumuh perkotaan, dimana melalui Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/498/KEP/25/2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Magelang, bahwa kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Magelang adalah seluas 85,09 Ha, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.57
Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
Kabupaten Magelang Tahun 2015

No	Kawasan	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Tertangani	Belum Tertangani
1.	Cikalan	Desa Banyurojo	Mertoyudan	20,71	20,71	-
2.	Soka	Desa Mertoyudan	Mertoyudan	10,36	-	10,36
3.	Jayan	Desa Borobudur	Borobudur	2,28	-	2,28
4.	Sempon	Desa Keji	Muntilan	11,54	-	11,54
5.	Pandansari	Desa Pucungrejo	Muntilan	15,14	-	15,14
6.	Semawe	Desa Sokorini	Muntilan	7,29	-	7,29
7.	Tegal Arum	Desa Tamanagung	Muntilan	4,87	-	4,87
8.	Kembangan	Desa Madusari	Secang	6,05	6,05	-
9.	Secang	Kelurahan Secang	Secang	6,85	6,85	-
Total				85,09	33,61	51,48
Tertangani					2,29	

Sumber : Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/498/KEP/25/2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Magelang

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 85,09 Ha kawasan permukiman kumuh, seluas 33,61 Ha telah tertangani pada tahun 2015. Sehingga luasan permukiman kumuh yang belum tertangani seluas 51,48 Ha. Total luas permukiman di Kabupaten Magelang adalah 17.904,2 Ha. Oleh karena itu, Persentase luasan permukiman kumuh pada tahun 2015 adalah 0,29%.

Perkembangan capaian indikator kinerja pada urusan Perumahan selama 2 (dua) tahun terakhir:

Tabel 3.58
Perkembangan Data Capaian Kinerja Urusan Perumahan
Kabupaten Magelang 2014-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015
1.	Rumah tangga bersanitasi	Persen	76,00	75,97
2.	Lingkungan pemukiman kumuh	Persen	2,74	0,29
3.	Rumah layak huni	Persen	53,04	53,13

Sumber : DPU ESDM Kabupaten Magelang, 2016

Rumah layak huni pada tahun 2015 capaiannya sebesar 53,13%, dimana capaian ini lebih rendah dari angka yang ditargetkan pada awal tahun sebesar 65,00%. Untuk meningkatkan kualitas hunian, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan upaya-upaya seperti pemberian bantuan stimulan untuk pemugaran dan rehabilitasi rumah penduduk. Data dari DPU ESDM Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2015 total pembangunan rumah layak huni berjumlah 2.209 unit, yang berasal dari dana APBD dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2014 yang berjumlah 1.365 unit yang berasal dari dana APBD, APBD Provinsi, dan BSPS Kementerian Perumahan Rakyat.

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan pada urusan perumahan selama tahun 2015:



Keterangan : Pembangunan jalan kampung, rehabilitasi, dan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Magelang Tahun 2015

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian kinerjanya menunjukkan prestasi yang menggembirakan, dimana terjadi peningkatan realisasi target pada 2 (dua) indikator kinerja dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ada. **Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019** rata-rata capaian kinerjanya telah melampaui target, yaitu sebesar 113,63%.

Dibandingkan dengan capaian provinsi, capaian kinerja urusan Perumahan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.59
Perbandingan Capaian Kinerja Urusan Perumahan
Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kab. Magelang	Prov. Jawa Tengah
1.	Rumah tangga bersanitasi	Persen	75,97	NA
2.	Lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,23	NA
3.	Rumah layak huni	Persen	53,13	78,67

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio rumah layak huni di Kabupaten Magelang pada tahun 2015 masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis III.2 yang merupakan urusan Perumahan pada tahun 2015 sebesar Rp24.588.250.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.339.994.591,00 atau 98,99%, atau tercipta efisiensi sebesar 1,01%. Proporsi terbesar dari anggaran itu diperuntukan untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan, yaitu sebesar 99,51% dari total anggaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan;
- b. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- c. Tingginya angka rumah tidak layak huni.

Alternatif solusi kebijakan pada urusan perumahan hendaknya diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman di masyarakat. **Program-program pendukung** pada pencapaian Sasaran strategis III.2 meliputi:

- 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan;
- 2. Program Pengembangan Perumahan;
- 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- 4. Program Perencanaan Tata Ruang.

Sasaran Strategis III.3	:	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan
--------------------------------	----------	--

Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral di Kabupaten Magelang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian (bahan galian golongan C). Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis III.3 *Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan* terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.60

Kinerja Sasaran Strategis III.3.

Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase pertambangan berizin	Persen	17,00	10,00	51,89*	518,90	50,00	103,78
2.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	Persen	2,54	2,62	2,49	95,04	2,64	94,32
Persentase Capaian Kinerja Sasaran III.3						306,97		99,05

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis III.3 *Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan* pada tahun 2015 adalah sebesar **306,97% (sangat baik)**. Sasaran Strategis ini terkait dengan ukuran keberhasilan pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Urusan pertambangan dan penertiban usaha pertambangan di Kabupaten Magelang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengusahaan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi tahun 2010, Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2011 tentang

Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, serta Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai Oktober 2014 urusan pertambangan ditarik ke Provinsi Jawa Tengah.

Persentase pertambangan berizin pada tahun 2015 adalah sebesar 51,89%. Data dari DPU dan ESDM Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa luasan pertambangan sampai dengan tahun 2015 sebesar 1.165 Ha, yang ditertibkan dan difasilitasi pengajuan izinnya ke tingkat provinsi Jawa Tengah adalah seluas 604,47 Ha, atau sejumlah 35 buah, yang terdiri dari 25 rekomendasi Tata Ruang, 3 Surat Keterangan Tata Ruang, dan 7 Fasilitas Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemberian fasilitasi ini sesuai kewenangan pemerintah kabupaten, karena yang berwenang mengeluarkan izin adalah pemerintah provinsi.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan jumlah penambangan berizin di Kabupaten Magelang antara lain:

1. Memfasilitasi masyarakat yang akan mengajukan permohonan izin tambang berupa:
 - a. Memetakan lokasi (membuat peta topografi, data koordinat dan penghitungan material) yang akan diajukan IPR.
 - b. Memintakan rekomendasi teknis BBWS-SO (IPR).
 - c. Melayani konsultasi perizinan (IUP, IPR).
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
3. Memonitor proses perizinan dan mendorong agar perizinan pertambangan dapat segera diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB pada tahun 2015 adalah sebesar 2,49%. Angka ini menurun 0,05% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 2,54%. Kontribusi sektor pertambangan banyak didukung dengan pertambangan Galian C berupa pasir dari daerah sekitar Gunung Merapi. Tabel berikut menunjukkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2010-2015 (atas dasar harga berlaku):

Tabel 3.61
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)
Kabupaten Magelang 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sektor Pertambangan	203.806,88	228.875,35	250.860,61	283.701,53	306.553,95	332.855,76
PDRB Kabupaten	8.022.322,50	8.770.808,59	9.736.556,37	10.814.289,76	12.047.100,23	13.372.281,26
% Kontribusi	2,54	2,61	2,58	2,62	2,54	2,49

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2016

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DPU dan ESDM Kabupaten Magelang, terdapat banyak potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Magelang, diantaranya tras (42,22 juta ton), tanah liat (2.531.900 m3), batu gamping, marmer (340.000 m3), andesit (58,5 juta ton), sirtu (33.327 juta ton), kaolin, oker (25.200 ton) dan mangaan (600 ton).

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan kinerja yang signifikan, terutama terkait dengan persentase peambangan berizin.

Dibandingkan dengan target RPJMD 2019, capaian capaian kinerja pada tahun 2015 telah mencapai rata-rata 99,05%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis III.3 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.870.477.945,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.778.409.250,00 atau 95,08%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan dan mineral;
2. Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan teknis dalam pemenuhan persyaratan izin tambang.

Alternatif solusi atas permasalahan di atas adalah:

1. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan mineral, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
2. Pembinaan kepada pelaku usaha tambang .

Program-program pembangunan untuk mendukung pencapaian Sasaran III.3 adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan;
3. Program Pengembangan Geologi Daerah;
4. Program Pengembangan Energi Alternatif;
5. Program Pengembangan ESDM.

Sasaran Strategis III.4	:	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan
--------------------------------	----------	--

Transportasi memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas penduduk maupun barang. Sarana transportasi berupa moda angkutan umum maupun kendaraan pribadi dapat menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten. Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis III.4 *Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan* terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.62
Kinerja Sasaran Strategis III.4.
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	3.448.751	3.705.271	3.656.365	98,68	3.705.271	98,68
2.	Jumlah Ijin Trayek	Ijin	1.088	1.032	1.129	109,40	1.069	105,61
3.	Rasio Uji Kir Kendaraan	persen	96,01	95,1	97,53	102,56	96,7	100,86
4.	Jumlah Terminal Bis	terminal	6	7	6	85,71	8	75,00
5.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	menit	32	32	32	100,00	32	100,00
6.	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji		Ada	Ada	Ada	100,00	ada	100,00
7.	Pemasangan Rambu-Rambu	persen	64,8	69,00	52,00	75,36	94,00	55,32
Persentase Capaian Kinerja Sasaran III.4						95,96		90,78

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis III.4 *Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan*

pada tahun 2015 adalah sebesar **95,96% (baik)**. Sasaran Strategis ini terkait dengan ukuran keberhasilan pada urusan perhubungan.

Indikator yang capaiannya belum memenuhi target adalah **jumlah arus penumpang angkutan umum, jumlah terminal bis, dan pemasangan rambu-rambu**.

Pemasangan rambu-rambu belum sesuai dengan target, dari 69,00% yang ditargetkan, hanya terealisasi 52,00% , hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran, sehingga capaian kinerjanya menjadi 75,36%. Dalam penyelenggaraan layanan sektor transportasi, aspek keselamatan lalu lintas angkutan jalan perlu mendapat perhatian utama tanpa mengesampingkan aspek keamanan, ketertiban dan kelancaran.

Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dilakukan upaya-upaya melengkapi prasarana jalan dengan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas serta pagar pengaman jalan (*guard rail*) disamping meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Selain itu untuk mendukung aspek keselamatan pula, masalah ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan pada tempat-tempat berkumpulnya angkutan umum pedesaan, diperlukan pembangunan terminal *origin destination* (OD).

Berikut perkembangan data kinerja pada urusan Perhubungan:

Tabel 3.63
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Magelang 2011-2015

Indikator Kinerja	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (%)	NA	8,58	28,75	28,22	20,51
Jumlah Terminal Bus (buah)	6	6	6	6	6
Persentase Uji Kendaraan Bermotor (%)	83,03	87,01	93,69	96,01	97,53
Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas (%)	NA	60,37	61,53	64,80	52,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2016

Dibandingkan dengan capaian tahun 2014, sebagian besar realisasi indikator kinerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan. **Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019** 4 (empat) indikator telah sesuai/melampaui target, dan 3 (tiga) indikator yang belum sesuai dengan target. Jika dirata-rata, capaian indikatornya 90,78% (baik).

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis III.4 pada urusan Perhubungan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.970.042.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.732.792.287,00 atau 92,01%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan, yang disebabkan karena keterbatasan anggaran.
2. Terjadinya fenomena penurunan *loadfactor* penumpang pada penggunaan angkutan umum dan terjadi kecenderungan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, serta banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak masuk terminal.
3. Penundaan pembangunan terminal.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

1. Penambahan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Perbaikan kualitas pelayanan angkutan umum;
3. Perbaikan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
4. Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis III.4 adalah :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

MISI IV	:	Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis IV.1	:	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam

Tolok ukur keberhasilan Sasaran Strategis IV.1 *Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam* terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.64
Kinerja Sasaran Strategis IV.1.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang,
serta Mengurangi Resiko Bencana Alam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	Persen	20,60	>30	>30	100,00	>30	100,00
2.	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Persen	NA	3,40	0,82	24,12	4,00	20,50
3.	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	Persen	0	0	0	100,00	0	100,00
4.	Luas Kawasan Lindung (ha)	Ha	52.485	25.886	25.886	100,00	25.886	100,00
5.	Luas Kawasan Budidaya (ha)	Ha	132.608	82.687	86.405	104,89	82.687	104,50
6.	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	IMB	429	550	594	108,00	676	87,87
7.	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	Persen	32	38	32	84,21	38	84,21
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV.1						88,75		85,30

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV.1 *Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam* pada tahun 2015 adalah sebesar 88,75% (baik). Sasaran Strategis IV.1 terkait dengan ukuran keberhasilan pada urusan Penataan Ruang.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2015 adalah >30. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. RTH yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah.

Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan pada tahun 2015 capaiannya masih jauh di bawah angka yang ditargetkan, yaitu sebesar 0,82% dari 3,40% yang ditargetkan pada awal tahun. Data dari DPU ESDM Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa selama tahun 2015, **jumlah IMB**

yang dikeluarkan sebanyak 594 buah. Hal ini terkait dengan kesadaran masyarakat di Kabupaten Magelang yang masih rendah untuk mengurus IMB. IMB bermanfaat untuk mendapatkan kepastian hukum pada bangunan yang dibangun sehingga ketika bangunan tersebut berdiri, tidak akan mengakibatkan gangguan atau hal yang merugikan kepentingan orang lain. Perlu disosialisasikan lebih lanjut, pentingnya memiliki IMB, yang diperlukan ketika:

1. Mendirikan bangunan baru;
2. Membongkar dan membangun kembali atau merenovasi bangunan lama;
3. Bangunan yang sudah lama berdiri tetapi belum memiliki IMB;
4. Mendirikan pagar temok pembatas;
5. Mendirikan konstruksi reklame;
6. Mendirikan tower, menara antena berkonstruksi;
7. Lantai terbuka dengan perkerasan (tempat penimbunan barang, parker);
8. Lapangan olahraga dengan pemadatan (lapangan tenis, golf, futsal).

Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital telah tersedia. Direncanakan, pada tahun 2016 akan ada revisi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kabupaten Magelang.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan kinerja. **Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019**, capaian pada tahun 2015 telah mencapai rata-rata 85,30%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis IV.1 pada tahun 2015 sebesar Rp 725.264.000,00 dengan realisasi sebesar 607.909.850,00 atau 84,99%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kepemilikan IMB;
2. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian teknis ke non pertanian tidak berizin.

Solusi alternatif untuk permasalahan di atas, adalah:

1. Pemberian sosialisasi dan informasi yang lebih intensif kepada masyarakat;
2. Pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan terkait alih fungsi lahan, yang melibatkan lintas SKPD.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis IV.1 adalah:

- 1. Program Perencanaan Tata Ruang;
- 2. Program Pemanfaatan Ruang;
- 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sasaran Strategis IV.2	:	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya
-------------------------------	----------	--

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda , daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi semua perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. **Tolok ukur keberhasilan** Sasaran Strategis IV.2 *Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya* terdiri dari 5 (lima) indicator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.65
Kinerja Sasaran Strategis IV.2.
Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase penanganan sampah	Persen	21,10	23,00	23,81	103,52	31,00	76,81
2.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Persen	1,30	1,40	1,90	135,71	2,10	90,48
3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL	Persen	30,00	20,00	20,00	100,00	30,00	66,67
4.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	0,44	0,080	0,10	125,00	1,76	5,68

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
5.	Jumlah daya tampung TPS (m3)	M3	141.985	100.000	153.167	153,17	2.300.000	6,66
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV.2						123,48		49,26

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV.2 *Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya* pada tahun 2015 adalah sebesar 123,48% (sangat baik). Semua indikator kinerja capaiannya sesuai/melebihi target. Sasaran Strategis IV.2 ini terkait dengan keberhasilan pada urusan Lingkungan Hidup.

Persentase penanganan sampah capaian kinerjanya pada tahun 2015 adalah sebesar 23,81%, meningkat 2,71% dibandingkan capaian pada tahun 2014 yang sebesar 21,10%. Berikut adalah data penanganan sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2015:

Tabel 3.66
 Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2015

No	Kecamatan	2014			2015		
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Produksi Sampah (m³)	Sampah Ditangani (m³)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Produksi Sampah (m³)	Sampah Ditangani (m³)
1.	Muntilan	78.532	134.583	28.397	79.604	128.805	30.577
2.	Mertoyudan	111.948	126.347	26.659	113.473	121.082	28.646
3.	Grabag	85.097	96.038	20.264	86.258	91.662	21.916
4.	Secang	79.822	90.117	19.015	80.912	86.150	20.512
5.	Mungkid	72.919	82.311	17.367	73.913	78.687	18.735
6.	Salaman	69.087	78.004	16.459	70.029	74.570	17.775
7.	Borobudur	58.034	65.515	13.824	58.825	62.330	15.026
	Jumlah	555.439	672.915	141.985	563.014	643.286	153.167
	% Penanganan Sampah			21,10			23,81

Sumber: DPU dan ESDM Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun produksi sampah menurun, namun sampah yang ditangani pada tahun 2015 sejumlah 153.167 m³ meningkat 11.182 m³ dibandingkan tahun 2014 dimana sampah ditangani sebesar 141.985 m³.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampai dengan akhir tahun 2015, karena keterbatasan sarana dan prasarana, Pemerintah Kabupaten Magelang baru bisa menangani sampah pada 7 (tujuh) kecamatan dari 21 kecamatan yang ada. Melalui **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 antara lain penyediaan sarana dan sarana pengelolaan persampahan, penanganan kebersihan lingkungan kota Muntilan, pemeliharaan kebersihan lingkungan kota Mungkid, rehab TPA Pasuruhan, pemeliharaan TPSS, pembuatan TPSS di Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, pengadaan tong sampah beroda, dan penyusunan Naskah Akademik pengelolaan persampahan untuk persiapan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun, **jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019**, ada 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya masih jauh dari target, yaitu **Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk**(5,68%) dan **Jumlah daya tampung TPS (m3) (6,66%)**.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis IV.2 pada tahun 2015 sebesar Rp 18.892.022.000,00 dengan realisasi sebesar 17.611.640.755,00 atau 93,22%. Tercipta efisiensi sebesar 6,78%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan persampahan;
2. Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan sampah;
3. Rasio TPS yang masih rendah.

Alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan di atas adalah:

1. Memperluascakupan wilayah pelayanan persampahan;
2. Meningkatkan anggaran untuk mengelola sampah;
3. Memperbanyak jumlah TPS.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis IV.2 adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

- 7. Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 8. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.

Sasaran Strategis IV.3	:	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana
------------------------	---	--

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak terpisahkan. Sedangkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Tolok ukur keberhasilan Sasaran Strategis IV.3 *Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana* terdiri dari dua (dua) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.67
 Kinerja Sasaran Strategis IV.3.
 Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	3.438,01	2.254	1.590	70,54	2.822	56,34
2.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	Ha	0,63	4,83	NA	-	4,66	-
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV.3						70,54		56,34

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis IV.3 *Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana* pada tahun 2015 adalah sebesar 70,54% (cukup). Sasaran Strategis IV.3 ini terkait degan ukuran keberhasilan pada pelaksanaan urusan Kehutanan.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis capaiannya pada tahun 2015 sebesar 1.590 Ha. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yaitu sebesar 3.438,01 Ha.

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%) belum tersedia datanya. Oleh karena itu tidak dimasukkan dalam komponen perhitungan capaian kinerja.

Berikut merupakan tabel yang memuat data luasan hutan rakyat dan lahan kritis di Kabupaten Magelang yang ditangani/direhabilitasi tahun 2010-2015.

Tabel 3.68
Data Luasan Hutan Rakyat dan Lahan Kritis
Kabupaten Magelang 2010-2015

No	Uraian	Potensi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Hutan Rakyat (Ha)	39.480,00	19.276,00	20.063,50	20.613,50	23.505,70	25.224,70	25.224,70
2.	Lahan Kritis (Ha)		33.101,21	31.014,08	29.081,13	24.392,93	23.132,54	23.132,54
3.	Ditangani (Ha)					4.498,30	3.438,01	1.590

Sumber : Distanbunhut Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa luasan hutan rakyat dan lahan kritis tidak mengalami perubahan. Tabel di atas juga menunjukkan masih terdapatnya potensi hutan rakyat yang belum tergarap, diharapkan dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat, maka potensi hutan rakyat seluas 39.480,00 Ha akan dimanfaatkan.

Lahan kritis di Kabupaten Magelang juga semakin berkurang dari tahun ke tahun. Kegiatan rehabilitasi, penghijauan, penanaman bibit maupun bantuan pupuk terus dilaksanakan, terutama difokuskan pada daerah-daerah yang rawan bencana longsor dan lahan kritisnya masih luas, seperti Kecamatan Salaman, Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik, dan Pakis. Sampai dengan tahun 2015, tercatat 722.247 Batang bibit yang ditanam untuk luasan 1.805,62 Ha, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.69
Realisasi Penanaman Bibit Kabupaten Magelang Tahun 2014-2015

No	Jenis Bantuan	2014		2015	
		Jumlah Bibit (Batang)	Luasan (Ha)	Jumlah Bibit (Batang)	Luasan (Ha)
1.	Perkebunan	122.050	305,13	0	0
2.	TPH	10.220	25,55	0	0
3.	SDPH	20.000	50,00	0	0
4.	BP2KP	2.650	6,63	0	0
5.	Kehutanan	1.375.202	3.438,01	2.854	7,14
6.	TNI/POLRI	252.514	631,29	0	0

No	Jenis Bantuan	2014		2015	
		Jumlah Bibit (Batang)	Luasan (Ha)	Jumlah Bibit (Batang)	Luasan (Ha)
7.	BLH	71.481	178,70	450	1,13
8.	BPDASSOP	66.139	165,35	667.943	839,50
9.	Swadaya/CSR	404.000	1.010	51.000	128,00
	Total	2.324.256	5.810,64	722.247	1.805,62

Sumber : Distanbunhut Kabupaten Magelang, 2016

Berikut, data perkembangan capaian kinerja urusan Kehutanan pada 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.70
Data Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
Kabupaten Magelang 2011-2015

Indikator Kinerja	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	1.510	550	4.498,30	3.438,01	1.590
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1.32	1.23	1.20	0,63	NA

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang 2016

Dibandingkan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan kinerja. **Jika dibandingkan target RPJMD 2019**, rata-rata capaiannya adalah 56,34%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis IV.3 pada tahun 2015 sebesar Rp 1.549.888.722,00 dengan realisasi sebesar Rp 602.011.525,00 atau 38,84%. Rendahnya serapan dikarenakan terkendala UU Nomor 23 Tahun 2014.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan, dan pemeliharaan dan pemberdayaan hutan. **Alternatif solusi** dari permasalahan di atas adalah meningkatkan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya hutan.

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis IV.3 adalah:

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

MISI V	:	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis
---------------	----------	--

Sasaran Strategis V.1	:	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah
------------------------------	----------	--

Tolok ukur capaian keberhasilan Sasaran Strategis V.1 *Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah*, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.71
 Kinerja Sasaran Strategis V.1.
 Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta
 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
2.	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
3.	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
4.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis V.1						100,00		100,00

Persentase CapaianSasaran Strategis V.1 *Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah* pada tahun 2015 adalah **100,00% (baik)**. Sasaran Strategis V.1 terkait dengan ukuran keberhasilan pada urusan Perencanaan Pembangunan. Pemerintah Kabupaten Magelang telah berhasil menyusun dokumen-dokumen perencanaan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, mengacu

pada dokumen-dokumen perencanaan di tingkat atasnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan kerja tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2014 – 2019 telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD tahun 2014-2019 merupakan indikator kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada tahun 2015 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 184 program dan seluruhnya sesuai dengan program RPJMD. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.72
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	177	177	177	182	184
Jumlah Program RKPD	177	177	177	182	184
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Magelang, 2016

Dibandingkan dengan tahun 2014, kinerja Sasaran Strategis V.1 adalah sama, dimana semua indikator kinerja telah terpenuhi. Begitu juga jika **dibandingkan dengan target RPJMD 2019**, semua indikator kinerja telah sesuai dengan target.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis V.1 pada tahun 2015 sebesar Rp 3.497.618.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.309.777.419,00 (94,63%). Efisiensi biaya yang tercipta sebesar 5,37%.

Kebijakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis V.1 diarahkan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas kelembagaan perencanaan pada setiap SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.

Program-program pembangunan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis V.1 adalah :

1. Program Pengembangan Data/ informasi;
2. Program Kerjasama Pembangunan;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

Sasaran Strategis V.2	:	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal
------------------------------	----------	---

Sasaran Strategis V.2 *Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal* terdiri dari 3 (tiga) urusan, yaitu urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; urusan statistik; dan urusan kearsipan. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.73

Kinerja Sasaran Strategis V.2.

Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdg target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		0,44	0,44	0,43	97,73	0,44	97,73
2.	Cakupan petugas		93,01	95,54	92,02	96,32	100,87	91,23

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
	Linmas per 10.000 penduduk							
3.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	Unit	1	3	2	66,67	4	50,00
4.	Penegakan PERDA	Persen	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	100,00
5.	Persentase Peningkatan PAD	Persen	39,48	12,02	8,23	68,47	12,02	68,47
6.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
7.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
8.	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
9.	Pengelolaan arsip secara baku	Persen	23,03	39,39	39,37	99,95	100,00	39,37
10.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	232	334	439	131,44	329	133,43
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis V.2						96,06		88,02

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja Sasaran Strategis V.2 *Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal* pada tahun 2015 adalah sebesar 96,06% (baik).

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2015 adalah 0,43. Angka diperoleh dari total anggota Satpol PP sejumlah 53 personil dibagi dengan total penduduk tahun 2015 sebesar 1.245.482 jiwa (BPS Kab. Magelang, 2016) dikalikan 10.000.

Cakupan petugas Linmas per 10.000 penduduk pada tahun 2015 adalah sebesar 90,67. Capaian ini lebih rendah dari yang ditargetkan pada awal tahun 2015 sebesar 95,54. Tabel berikut menunjukkan data Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3.74
Cakupan Petugas Linmas Kabupaten Magelang 2011-2015

No	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Petugas Linmas	11.475	11.462	11.475	11.475	11.461
2.	Jumlah Penduduk	1.193.569	1.219.371	1.221.681	1.233.983	1.245.482
3.	Cakupan Petugas Linmas/10.000 penduduk	96,14	94,00	93,93	93,01	92,02

Sumber: Satpol PP Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan terjadinya penurunan cakupan petugas Linmas per 10.000 penduduk di tahun 2015 yang disebabkan berkurangnya personil karena meninggal dunia, telah sampai pada batas usia pensiun sebagai petugas Linmas dan belum ada regenerasi petugas Linmas.

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintahpada tahun 2015 berjumlah 2 (dua), yang terdiri dari aplikasi SPIPISE dan SIM PAP PM.

Sedangkan kegiatan-kegiatan Trantib dan **Penegakan PERDA** yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.75
Jumlah Kegiatan Trantib dan Penegakan PERDA Tahun 2011-2015

No	Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PAM Demo	7	14	12	7	6
2.	PA Sosial Budaya	101	0	68	70	49
3.	Pengawalan	59	0	77	79	58
4.	Operasi Pasar dan PKL Rutin	106	159	126	104	117
5.	Operasi Pasar dan PKL terpadu	82	9	21	16	16
6.	Patroli Wilayah	189	257	172	152	117
7.	Miras	94	55	19	21	12
8.	PGOT	17	33	35	24	34
9.	Asusila	27	44	19	21	17
10.	Pelajar dan PNS	37	55	25	24	21
11.	Yustisi	1	0	0	0	0
12.	Represif Non Yustisi	39	43	25	24	21
13.	Penegakan PERDA	137	413	714	413	486
	Jumlah	896	1.082	1.313	955	954

Sumber: Satpol PP Kabupaten Magelang, 2016

Pada periode 5 (lima) tahun terakhir, kegiatan trantib difokuskan pada patroli wilayah dan penertiban PKL, yaitu di daerah Muntilan dan Mertoyudan. Sedangkan penegakan PERDA berjumlah 486 kegiatan diantaranya berupa penertiban papan reklame, penertiban tower, dan penertiban IMB.

Capaian Persentase Peningkatan PAD tahun 2015 adalah sebesar 8,23%, belum sesuai dengan angka yang ditargetkan, yaitu sebesar 12,02%. Berdasarkan data dari DPPKAD Kabupaten Magelang, di tahun 2015 PAD yang diperoleh sebesar Rp 261.542.589.723,00, sedangkan di tahun 2014 sebesar Rp 241.660.771.544,00. Hal ini disebabkan karena adanya pemutusan kontrak Taman Rekreasi Kalibening karena pemborong wanprestasi sehingga target retribusi tidak terealisasi. Disamping itu, adanya putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Perubahan Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Berdasarkan Perda Baru. Oleh karena itu retribusi dari pengendalian menara telekomunikasi belum dapat ditarik sebelum diterbitkan Perda baru.

Berikut adalah gambaran penarikan retribusi, pelayanan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya pada DPPKAD Kabupaten Magelang:



Ket. Photo: Kegiatan penarikan retribusi Galian C dan pelayanan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM) setiap tahun telah dilaksanakan. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan survey IKM dengan Metode Penilaian Mandiri oleh 86 Unit Pelayanan Publik, dengan rata-rata nilai yang diperoleh sebesar **75,95** (kategori baik). Jumlah ini mengalami peningkatan, karena pada tahun 2014, telah

dilaksanakan survei IKM terhadap 64 UPP dengan nilai IKM sebesar **75,93 (kategori baik)**. Pelaksanaan survei IKM ini sesuai dengan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 serta SE Menpan dan RB No: 4 /Menpan dan RB/03/2013 tentang Pelaksanaan Survei IKM pada seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun. Berikut data perkembangan IKM selama 5 lima) tahun terakhir:

Tabel 3.76
Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Magelang, 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Survei IKM	68,22	74,88	79,25	75,93	75,95

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Magelang. 2015

Pada tahun 2015 survei kepuasan masyarakat dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mencakup 9 variabel pelayanan, yaitu:

- 1. Persyaratan;
- 2. Prosedur;
- 3. Waktu Pelayanan;
- 4. Biaya/tarif;
- 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6. Kompetensi Pelaksana;
- 7. Perilaku Pelaksana;
- 8. Maklumat Pelayanan; dan
- 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Di samping 9 unsur pelayanan tersebut, pada survei kepuasan masyarakat tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Magelang menambahkan unsur pelayanan Kelengkapan Sarana dan Prasarana. Survey IKM ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Pengelolaan arsip secara baku tercapai 39,37% dari keseluruhan. SDM Pengelola Kearsipan yang diberikan sosialisasi dan *workshop* juga meningkat signifikan, menjadi 439 orang pada akhir tahun 2015 dari 334 orang yang ditargetkan pada awal tahun 2015.

Dibandingkan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 sebagian mengalami penurunan, terutama pada rasio jumlah Polisi Pamong Praja, cakupan petugas Linmas dan Persentase peningkatan PAD. Menurunnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja serta cakupan petugas Linmas disebabkan karena adanya mutasi dari aparat Satpol ke SKPD lain, serta adanya anggota Linmas yang meninggal dan belum ada petugas penggantinya.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 mencapai 88,02%.

Anggaran pada Sasaran Strategis V.2 *Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal* di tahun 2015 adalah sebesar Rp 42.023.316.970,00 dengan realisasi sebesar Rp 34.973.454.327,00 atau sebesar 83,22%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Sasaran V.2 antara lain:

1. Tingkat eselonisasi yang belum sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga berdampak pada kekurangan jumlah personil;
2. Belum memiliki PPNS;
3. Kurangnya Diklat SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas;
4. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti keterbatasan mobil patroli yang dimiliki.
5. Terbatasnya jumlah anggaran.
6. Kecenderungan PAD yang makin menurun karena pengurangan retribusi Kalibening dan penghapusan retribusi menara telekomunikasi.
7. Kurangnya sinkronisasi data statistik pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki SKPD dan instansi pemerintah.

Solusi alternatif nya adalah:

1. Penyesuaian SOTK Satpol PP;
2. Pembentukan PPNS;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Diklat SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana, seperti keterbatasan mobil patroli yang dimiliki;
5. Mengkaji ulang Perda dan menggali potensi-potensi PAD yang baru;
6. Pengembangan pusat data dan informasi yang dapat diandalkan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dalam pembangunan;
7. Sinkronisasi pengelolaan data/informasi/statistik daerah;

8. Memperbaiki sistem administrasi kearsipan, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah.

Program-program pembangunan pada Sasaran V.2 yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah;
7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
11. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
12. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
13. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
14. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
15. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
16. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
17. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
18. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
19. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
20. Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian;
21. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
22. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal;
23. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan;
24. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
25. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.
26. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

- 27. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
- 28. Program Penyelamatan Data dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
- 29. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

Sasaran Strategis V.3	:	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak
-----------------------	---	---

Sasaran Strategis V.3 *Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak* yang membawahi urusan Komunikasi dan Informasi terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.77
 Kinerja Sasaran Strategis V.3.
 Meningkatkan Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Jumlah penyiaran Radio/TV local	Penyiaran	6	6	8	133,33	6	133,33
2.	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
3.	Jumlah Surat Kabar Lokal/Nasional	Buah	9/3	9/3	9/3	100,00	9/3	100,00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis V.3						111,11		111,11

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja Sasaran Strategis V.3 *Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak* pada tahun 2015 adalah sebesar 111,11% (baik).

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2015, **Jumlah penyiaran Radio/TV lokal** yang sudah berizin berjumlah 8 penyiaran, yang terdiri dari 7 penyiaran radio dan 1 penyiaran TV lokal. Penyiaran radio yang aktif adalah Gemilang,Pop, Best, Merapi, Factabic, Unima, dan Walisongo. Sedangkan siaran TV lokal adalah Magelang TV. Sedangkan penyiaran radio/tv lokal yang belum berizin masih banyak yang beroperasi. Diharapkan ke depan semua penyiaran radio/tv lokal tersebut bisa difasilitasi untuk memperoleh izin.

Website milik Pemerintah Daerah telah aktif sampai ke desa-desa melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Program pemberdayaan kontributor website dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan bidang IT setiap tahun secara bertahap. Tahun 2015 merupakan tahun kedua yang sudah berjalan.

Jumlah Surat Kabar Lokal/Nasional adalah 9/3, yang terdiri dari Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos, Kompas, Sindo, Wawasan, Magelang Ekspres, Suara Gemilang, Joko Lodang / Tempo, Gatra, dan Metro.

Dibandingkan dengan tahun 2014, capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan, terutama pada jumlah penyiaran radio/TV lokal.

Dibandingkan dengan target RPJMD 2019, capaian pada tahun 2015 telah melampaui target, dengan rata-rata capaian 111,11% (sangat baik).

Anggaran untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis V.3 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 4.645.823.750,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.065.537.029,00 atau 87,51%. Tercipta efisiensi biaya sebesar 12,49%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

- 1. Terbatasnya akses informasi yang didapat masyarakat;
- 2. Kurangnya sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informasi.

Alternatif solusinya adalah peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan informasi dan komunikasi, serta penambahan kuantitas jumlah SDM pengelola komunikasi dan informasi.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis V.3 adalah:

- 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- 2. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
- 3. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

Sasaran Strategis V.4	:	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil
------------------------------	----------	---

Sasaran Strategis V.4 *Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil* yang membawahi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dan urusan Pertanahan terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.78
Kinerja Sasaran Strategis V.4.
Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	Persen	93,91	91,73	88,62	96,61	91,87	96,46
2.	Bayi Berakte Kelahiran	Persen	91,40	82,57	61,00	73,88	100,00	61,00
3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Persen	11.141*	1,70	10.600*	-	1,80	-
4.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	100,00	Sudah	100,00
5.	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	51,38	33,69	51,80	153,75	33,83	153,12
6.	Penyelesaian izin lokasi	Persen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis V.4						104,85		102,12

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja Sasaran Strategis V.4 *Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil* pada tahun 2015 adalah sebesar 104,85% (baik).

Ada satu indikator kinerja, yang belum bisa diukur, yaitu **Rasio pasangan berakte nikah**. Angka yang tertera pada kolom realisasi sebesar 10.600* merupakan jumlah pasangan yang menikah dan telah mempunyai akte nikah, yang tercatat di Disdukcapil sejumlah 221 pasangan, dan tercatat di Kemenag Kabupaten Magelang sejumlah 10.379 pasang.

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk mengalami penurunan, dari 93,91% pada tahun 2014 menjadi 88,62% pada tahun 2015. Demikian juga dengan bayi berakte kelahiran, yang mengalami penurunan pada tahun 2015, menjadi 61,00% dari 91,40% di tahun 2014. Berikut adalah perkembangan kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.79
Kinerja Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Magelang 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	38,67	82,92	86,93	93,91	88,62
2.	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	68,2	69,0	71,5	91,40	61,00
3.	Rasio pasangan berakte nikah	1,89	1,75	1,62	204*	221*

**Angka absolut*
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2016

Tabel berikut memuat data kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang per akhir tahun 2015.

Tabel 3.80
Data Kependudukan di Kabupaten Magelang 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk Wajib KTP	938.867	1.004.585	1.022.799	986.210	997.698	NA
Penduduk ber KTP	343.431	416.098	461.189	822.714	827.984	NA
Persentase Kepemilikan KTP	36,58	41,22	45,09	83,42	93,91	88,62

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap tahun persentase kepemilikan KTP menunjukkan peningkatan. Melalui **Program Penataan Administrasi Kependudukan**, Disdukcapil Kabupaten Magelang adalah terus melakukan sosialisasi secara intensif untuk memberikan kesadaran pada masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan akte kelahiran.

Persentase luas lahan bersertifikat pada tahun 2015 realisasinya adalah sebesar 51,80%. Capaian ini melampaui angka target yang telah ditetapkan di awal tahun, yaitu sebesar 33,69%.

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak atas tanah maka kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yang bersertifikat, yaitu 8.754 sertifikat pada tahun 2015. Adapun perkembangan jumlah penerbitan sertifikat di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.81
Jumlah Penerbitan Sertifikat Tanah di Kabupaten Magelang, 2011-2015

Tanah Bersertifikat	Jumlah Penerbitan Sertifikat				2015
	2011	2012	2013	2014	
Hak Milik	10.397	25.119	17.401	7.727	7.779
Hak Guna Bangunan	831	283	279	827	872
Hak Guna Usaha	-	-	22	1	-
Hak Pakai	29	25	12	58	103
Hak Pengelola	-	-	-	-	-
Jumlah	11.257	25.427	17.714	8.634	8.754

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, 2016

Sementara itu jumlah tanah bersertifikat selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.82
 Jumlah Tanah Bersertifikat Tanah Tahun 2011-2015

Tanah Bersertifikat	Jumlah Tanah Bersertifikat				2015
	2011	2012	2013	2014	
Hak Milik	309.845	334.964	352.365	367.807	375.586
Hak Guna Bangunan	4.363	4.646	4.925	5.566	6.438
Hak Guna Usaha	1	1	1	31	31
Hak Pakai	1.652	1.677	1.689	1.758	1.861
Hak Pengelola	9	9	9	9	9
Jumlah	315.870	341.297	358.989	375.171	383.925

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, 2016

Penyelesaian izin lokasi pada tahun 2015 adalah 100,00%. Dari 98 pengajuan ke BPMPPT Kabupaten Magelang selama tahun 2015, semuanya telah diproses pengajuan izinnya. Pengajuan tersebut terdiri dari IPMT 32 buah, IPPT 50 buah, izin lokasi 6 buah, dan izin prinsip 10 buah. Pengajuan izin lokasi saat ini sudah menyertakan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) yang dikeluarkan oleh DPU ESDM Kabupaten Magelang. SKRK akan mencocokkan data lokasi dengan RTRW yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten. Sehingga prosesnya menjadi semakin mudah dan tidak berbelit-belit.

Berikut data-data perkembangan capaian kinerja pada urusan Pertanahan selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.83
 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Magelang 2011-2015

Indikator Kinerja	Tahun				2015
	2011	2012	2013	2014	
Persentase luas lahan bersertifikat (%)	30,86	32,73	33,55	51,38	51,80
Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	80	80	100,00

Sumber: BPN dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang, 2016

Dibandingkan tahun 2014, capaian kinerja pada tahun 2015 untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil mengalami penurunan capaian kinerja. Namun untuk urusan pertanahan mengalami peningkatan kinerja. Jika **dibandingkan dengan target RPJMD 2019**, capaian pada tahun 2015 telah mencapai rata-rata 102,12%

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis V.4 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.900.353.533,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.796.487.249,00 atau 96,42%.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis V.4 adalah:

1. Kendala jaringan internet yang tidak lancar di 6 kecamatan sehingga berpengaruh pada jangka waktu pembuatan dokumen kependudukan;
2. Keterbatasan blanko e-KTP dari pusat, sehingga pencetakan e-KTP tidak sesuai standar waktu;
3. Kesadaran masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan yang masih rendah, dimana masyarakat biasanya membuat manakala dibutuhkan.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas adalah:

1. Untuk memperlancar jaringan internat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang untuk meningkatkan *bandwitch* internet;
2. Pengadaan sarana dan prasarana piranti e-KTP pada tahun 2017 agar setiap kecamatan bisa melakukan cetak e-KTP;
3. Sosialisasi intensif tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis V.4 adalah:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
2. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
3. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

Misi VI	:	Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat
---------	---	--

Sasaran Strategis VI.1	:	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat
------------------------	---	--

Sasaran Strategis VI.1 *Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, mencakup Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.84
Kinerja Sasaran Strategis VI.1.
Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran
dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	6	9	5	55,56	12	41,67
2.	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	5	6	5	83,33	12	41,67
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI.1						69,45		41,67

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis VI.1 *Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat* pada tahun 2015 adalah sebesar **69,45% (cukup)**.

Indikator kinerja **Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah** pada tahun 2015 capaian kinerjanya adalah 55,56%. Melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Magelang selama tahun 2015 telah melaksanakan upaya-upaya pembinaan politik daerah, diantaranya sosialisasi pemantapan budaya politik dengan peserta pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pendidikan politik bagi elemen masyarakat, pemberian bantuan keuangan Partai Politik, serta kemitraan perpolisian masyarakat. Jumlah kegiatan berkurang menjadi 5 kegiatan, karena kegiatan pembinaan untuk pemilih pemula ditiadakan. Pada tahun ini, frekuensi kegiatan pembinaan mengalami penurunan karena tidak diagendakan kegiatan pembinaan politik kepada masyarakat.

Indikator kinerja **Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP** pada tahun 2015 capaian kinerjanya 100,00%. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Magelang juga melakukan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diantaranya mengadakan penyuluhan dan fasilitasi mengenai kepengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Jika dibandingkan dengan tahun 2014, capaian tahun 2015 banyak yang mengalami penurunan. Hal ini terkait dengan pengurangan jumlah

kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, serta berkurangnya jumlah kegiatan pembinaan politik daerah.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019, capaian pada tahun 2015 rata-rata 41,67%. Capaian ini masih jauh dari angka yang ditargetkan pada akhir periode RPJMD.

Anggaran pada Sasaran Strategis VI.1 pada tahun 2015 sebesar Rp 1.219.275.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.156.545.699,00 atau 94,86%.

Permasalahan dan kendala untuk mencapai Sasaran Strategis VI.1 antara lain:

1. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam organisasi masyarakat dan politik.
2. Banyak masyarakat yang belum memanfaatkan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilukada. Hal ini terbukti baru 71,74% yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada 2013.

Alternatif solusi terhadap permasalahan di atas adalah:

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam organisasi masyarakat dan politik;
2. Pengembangan wawasan kebangsaan;
3. Sosialisasi penggunaan hak pilih;

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis VI.1 adalah:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal;
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
5. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan;
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.

Sasaran Strategis VI.2	:	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat
-------------------------------	----------	---

Sasaran Strategis VI.2 *Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat*, mencakup Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.85
Kinerja Sasaran Strategis VI.2.
Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	2015			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	Persen	40,00	60,00	60,00	100,00	100,00	60,00
2.	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen	50,00	60,00	55,00	91,67	100,00	55,00
4.	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Persen	100,00	100,00	80,00	80,00	100,00	80,00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI.2						92,92		73,75

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis VI.2 *Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat* pada tahun 2015 adalah sebesar **92,92% (baik)**.

Ada 2 (dua) indikator kinerja yang belum sesuai dengan harapan, yaitu **Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana**, realisasi tahun 2015 masih 55,00%, dan **Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana** realisasi tahun 2015 masih 80,00%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2014, capaian tahun 2015 mengalami peningkatan kinerja. **Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019**, capaian pada tahun 2015 rata-rata 73,75%. Capaian ini masih jauh dari angka yang ditargetkan pada akhir periode RPJMD 2019.

Anggaran pada Sasaran Strategis VI.2 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 11.662.681.150,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.357.338.262,00 atau 37,36%. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target pengadaan tanah untuk hunian tetap dan gagal lelang untuk pengadaan *Early Warning System* (EWS) pada BPBD Kabupaten Magelang.

Permasalahan dan kendala dalam mencapai Sasaran Strategis VI.2 antara lain:

1. Masih terbatasnya SDM yang paham dan mengerti tentang penanganan bencana;
2. Belum terintegrasinya dan terstandardisasinya mekanisme/system pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang;
3. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana;
4. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
5. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Magelang;
6. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang;
7. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang;
8. Belum memadainya kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang;
9. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Magelang;
10. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang;
11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Alternatif solusi terhadap permasalahan di atas adalah:

1. Bimtek tentang penanganan bencana;
2. Mengintegrasikan dan menstandardisasikan mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang;
3. Fasilitasi gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana;
4. Peningkatan jumlah sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
5. Menambah ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Magelang;
6. Menyusun pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang;
7. Fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang;
8. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memadai di Kabupaten Magelang;

9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang;
10. Mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis VI.2 adalah Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

3.3. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN TAHUN 2015

3.3.1. Target, Realisasi, dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis

Jumlah sasaran strategis yang dilaksanakan pada tahun 2015 berjumlah 31 (tiga puluh satu), yang dijabarkan melalui 173 program. Total anggaran untuk membiayai belanja langsung program/kegiatan untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp 755.743.358.729,00 dengan penyerapan sebesar Rp 547.368.466.255,00 atau sebesar 72,43%. Kekurangmaksimalan penyerapan anggaran sebagian besar disebabkan karena SILPA, terkait dengan dana hibah, yang terkendala UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut disajikan target, realisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan sasaran strategis pada tahun 2015:

Tabel 3.86

Target, Realisasi dan Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis
Kabupaten Magelang Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
	MIsi I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama						
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan			146,397,310,892	112,521,252,445	76.86%	Efisiensi 23,14%
		Kasus Kematian Ibu Melahirkan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3,411,547,448	3,132,366,940	91.82%	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	662,068,000	291,993,050	44.10%	
		Persentase Balita Gizi Buruk	Program Pengawasan Obat dan Makanan	90,683,000	89,441,620	98.63%	
		Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	317,800,000	310,811,685	97.80%	
		Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	650,588,000	646,139,690	99.32%	
		Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	376,000,000	371,648,200	98.84%	
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	848,845,000	820,622,366	96.68%	
		Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	291,000,000	249,608,140	85.78%	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masvarakat Miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	9,446,394,350	9,369,758,090	99.19%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
		Cakupan Kunjungan Bayi	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	4,811,364,020	3,171,568,060	65.92%	
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	13,836,235,740	13,557,191,660	97.98%	
			Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	16,850,000	16,848,000	99.99%	
			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	104,700,000	100,596,400	96.08%	
			Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	111,531,585,334	80,391,008,544	72.08%	
			Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1,650,000	1,650,000	100.00%	
2.	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol			2,962,060,000	2,468,793,950	83.35%	Efisiensi 16,65%
		Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	293,090,000	291,926,600	99.60%	
		Rasio Akseptor KB	Program Keluarga Berencana	2,418,970,000	1,930,186,950	79.79%	
		Cakupan Peserta KB Aktif	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	129,000,000	128,080,500	99.29%	
		Keluarga Pra Sejahtera	Program pelayanan Kontrasepsi	112,000,000	109,600,000	97.86%	
		Keluarga Sejahtera I	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	9,000,000	8,999,900	100.00%	
3.	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan			163,650,748,797	75,905,655,478	46.38%	SILPA 53,62%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
		APK PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini	716,417,500	697,108,445	97.30%	
		Angka melek huruf	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	112,198,934,472	48,194,000,488	42.95%	
		Angka rata-rata lama sekolah	Program Pendidikan Menengah	31,503,461,763	8,591,037,555	27.27%	
		Angka Partisipasi Murni:	Program Pendidikan Non Formal	350,000,000	198,461,850	56.70%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,107,910,000	3,003,883,980	96.65%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	15,774,025,062	15,221,163,160	96.50%	
		Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C					
		Angka partisipasi kasar					
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A					
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B					
		Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C					
		Angka Putus Sekolah:					
		Angka Putus Sekolah SD/MI					
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs					
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
		Angka Kelulusan:					
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI					
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs					
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA					
		Rerata Nilai UN :					
		Rerata Nilai UN SD/MI					
		Rerata Nilai UN SMP/MTs					
		Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK					
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV					
		Angka Melanjutkan :					
		Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs					
		Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA					
		Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI					
		Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS					
4.	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga			9,693,734,000	4,294,441,310	44.30%	SILPA 55,70%
		Jumlah Organisasi Pemuda	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	80,000,000	77,227,000	96.53%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
		Jumlah Organisasi Olah Raga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	360,000,000	292,856,200	81.35%	
		Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	52,000,000	45,672,500	87.83%	
		Jumlah Kegiatan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1,529,300,000	1,487,413,450	97.26%	
		Lapangan Olah Raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	7,662,434,000	2,381,272,160	31.08%	
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	10,000,000	10,000,000	100.00%	
5.	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca			530,995,835	521,908,875	98.29%	Efisiensi 1,71%
		Jumlah Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	530,995,835	521,908,875	98.29%	
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun					
		Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah					
6.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan			1,221,365,500	1,188,299,845	97.29%	Efisiensi 2,71%
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	243,600,000	234,716,375	96.35%	
		Rasio KDRT	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	121,000,000	117,319,665	96.96%	
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	216,237,500	214,707,570	99.29%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	640,528,000	621,556,235	97.04%	
7.	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin			2,618,039,444	2,448,604,310	93.53%	Efisiensi 6,47%
		Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	471,236,544	440,483,390	93.47%	
		PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	524,300,000	496,802,915	94.76%	
			Program pembinaan eks penyandang penyakit ocial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit ocial lainnya)	54,000,000	53,387,940	98.87%	
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	162,000,000	155,811,050	96.18%	
			Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	1,406,502,900	1,302,119,015	92.58%	
8.	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila			1,091,375,000	1,047,665,630	96.00%	Efisiensi 4%
		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	308,500,000	301,024,700	97.58%	
		Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	562,875,000	540,204,465	95.97%	
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	220,000,000	206,436,465	93.83%	
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	308,500,000	301,024,700	97.58%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
9.	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan			6,587,152,900	6,212,417,287	94.31%	Efisiensi 5,69%
		Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4,903,304,900	4,626,352,612	94.35%	
		Cakupan Kelompok Binaan PKK	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	291,306,000	221,526,475	76.05%	
		Jumlah LSM	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	22,090,000	18,079,000	81.84%	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	613,432,000	602,049,210	98.14%	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	19,285,000	19,285,000	100.00%	
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	737,735,000	725,124,990	98.29%	
	MISI II : Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing						
10.	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja			5,177,437,000	4,136,769,695	79.90%	SILPA 20,10%
		Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,115,000,000	2,079,565,150	98.32%	
		Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2,659,725,000	1,677,232,750	63.06%	
		Pencari Kerja yang Ditempatkan	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	402,712,000	379,971,795	94.35%	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,115,000,000	2,079,565,150	98.32%	
		Keselamatan dan Perlindungan					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
		Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah					
11.	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal			1,051,659,000	1,010,379,140	96.07%	Efisiensi 3,93%
		Persentase Koperasi Aktif	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	309,779,000	284,956,380	91.99%	
		Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	285,150,000	283,290,150	99.35%	
		Jumlah BPR/LKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	295,000,000	288,506,900	97.80%	
		Usaha Mikro dan Kecil	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	161,730,000	153,625,710	94.99%	
12.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah			759,400,000	727,269,550	95.77%	Efisiensi 4,23%
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	205,400,000	195,939,550	95.39%	
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	517,500,000	496,120,630	95.87%	
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	36,500,000	35,209,370	96.46%	
		Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
13.	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat			531,930,000	511,190,753	96.10%	Efisiensi3,90%
		Ketersediaan Pangan Utama Beras	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	531,930,000	511,190,753	96.10%	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah					
14.	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.			35,019,234,000	9,514,598,930	27.17%	SILPA 72,83%
		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	29,749,331,000	5,648,125,456	18.99%	
		Produktivitas Padi	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1,705,608,000	1,381,333,779	80.99%	
		Produksi Padi	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	486,633,000	342,778,910	70.44%	
		Produktivitas Jagung	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	790,000,000	248,121,805	31.41%	
		Produksi Jagung	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	197,500,000	181,712,250	92.01%	
		Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1,378,338,000	1,012,970,250	73.49%	
		Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	105,000,000	98,874,475	94.17%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
		Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	45,000,000	44,474,100	98.83%	
		Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	70,000,000	67,876,375	96.97%	
		Cakupan Bina Kelompok Petani	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	491,824,000	488,331,530	99.29%	
		Produksi Hewan ternak					
		Sapi potong					
		Kerbau					
		Kambing					
		Domba					
		Produksi Hewan Unggas					
		Ayam Pedaging					
		Ayam Ras Petelur					
		Ayam Buras					
		Itik					
		Sapi Perah					
		Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)					
		Daging					
		Telur					
		Susu					
15.	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan			3,845,300,000	3,761,371,550	97.82%	Efisiensi 2,18%
		Produksi Perikanan (Benih)	Program pengembangan budidaya perikanan	3,595,300,000	3,515,578,150	97.78%	
		Produksi Perikanan Budidaya	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	130,000,000	128,148,400	98.58%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
		Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	120,000,000	117,645,000	98.04%	
		Konsumsi Ikan					
		Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)					
16.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan			33,613,853,185	27,226,627,620	81.00%	SILPA 19,00%
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	32,438,468,685	26,220,583,340	80.83%	
		Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	446,721,500	411,396,130	92.09%	
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	208,327,000	178,479,300	85.67%	
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	245,336,000	232,220,950	94.65%	
			Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	275,000,000	183,947,900	66.89%	
			Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	32,438,468,685	26,220,583,340	80.83%	
17.	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah			1,394,339,500	1,281,639,510	91.92%	Efisiensi 8,08%
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	164,097,000	152,985,525	93.23%	
		Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	284,903,500	280,545,725	98.47%	
		Pertumbuhan Industri.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	200,000,000	185,297,525	92.65%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
			Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	745,339,000	662,810,735	88.93%	
18.	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah			3,919,190,030	3,715,619,490	94.81%	Efisiensi 5,19%
		Kunjungan Wisata Manca Negara	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3,277,940,030	3,082,918,800	94.05%	
		Kunjungan Wisata Nusantara	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	420,391,675	415,481,245	98.83%	
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	Program Pengembangan Kemitraan	220,858,325	217,219,445	98.35%	
	MISI III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah						
19.	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru			134,257,475,514	115,907,996,374	86.33%	SILPA 13,67%
		Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	65,279,095,000	53,650,776,970	82.19%	
		Luas Jaringan Irigasi	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	12,734,868,000	9,594,206,950	75.34%	
		Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	20,408,662,000	19,922,898,400	97.62%	
			Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	70,000,000	49,985,000	71.41%	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1,776,631,625	1,599,100,605	90.01%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
			Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	27,240,219,640	25,229,595,829	92.62%	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	546,000,500	465,346,360	85.23%	
			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	532,123,406	457,685,935	86.01%	
			Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	1,088,050,500	800,015,375	73.53%	
			Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	2,402,487,043	2,117,501,600	88.14%	
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	2,126,675,800	1,970,015,900	92.63%	
			Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	52,662,000	50,867,450	96.59%	
20.	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat			24,588,250,500	24,339,994,591	98.99%	Efisiensi1,01%
		Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	23,521,853,500	23,405,467,632	99.51%	
		Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	Program Pengembangan Perumahan	523,420,000	477,068,423	91.14%	
		Rumah Layak Huni (%)	Program Lingkungan Sehat Perumahan	145,227,000	114,843,550	79.08%	
			Program Perencanaan Tata Ruang	397,750,000	342,614,986	86.14%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
21.	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan			1,870,477,945	1,778,409,250	95.08%	Efisiensi 4,92%
		Persentase Pertambangan Berijin	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	20,000,000	16,074,950	80.37%	
		Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan	1,419,540,000	1,362,123,200	95.96%	
			Program pengembangan Geologi Daerah	184,492,945	181,938,905	98.62%	
			Program Pengembangan Energi Alternatif	100,000,000	97,624,350	97.62%	
			Program Pengembangan ESDM	146,445,000	120,647,845	82.38%	
22.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan			2,970,042,100	2,732,792,287	92.01%	Efisiensi 7,99%
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	696,920,000	602,873,724	86.51%	
		Jumlah Ijin Trayek	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	407,586,700	351,683,680	86.28%	
		Rasio Uji Kir Kendaraan	Program peningkatan pelayanan angkutan	687,718,000	654,634,133	95.19%	
		Jumlah Terminal Bis	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	51,780,000	51,028,000	98.55%	
		Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1,126,037,400	1,072,572,750	95.25%	
		Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
		Pemasangan Rambu-Rambu					
	MISI IV : Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup						
23.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam			715,264,000	607,909,850	84.99%	SILPA 15,01%
		Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	Program Pemanfaatan Ruang	493,012,000	416,705,800	84.52%	
		Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	222,252,000	191,204,050	86.03%	
		Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya					
		Luas Kawasan Lindung (ha)					
		Luas Kawasan Budidaya (ha)					
		Jumlah IMB yang Dikeluarkan					
		Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
24.	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya			18,892,022,000	17,611,640,755	93.22%	Efisiensi 6,78%
		Persentase Penanganan Sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9,090,307,000	8,352,019,235	91.88%	
		Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2,350,262,000	2,090,559,070	88.95%	
		Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	237,000,000	232,011,172	97.90%	
		Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	2,337,979,000	2,212,547,440	94.64%	
		Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,912,591,000	2,812,826,865	96.57%	
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi	942,522,000	926,056,730	98.25%	
			Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	672,743,000	665,202,635	98.88%	
			Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup	348,618,000	320,417,608	91.91%	
25.	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana			1,549,888,722	602,011,525	38.84%	SILPA 61,16%
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	99,992,000	54,638,840	54.64%	
		Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1,352,831,722	456,235,110	33.72%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
		Perkebunan (%)					
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	97,065,000	91,137,575	93.89%	
	MISI V : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis						
26.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah			3,497,618,500	3,309,777,419	94.63%	Efisiensi 5,37%
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Program Pengembangan Data /Informasi	370,875,000	343,991,710	92.75%	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,049,119,500	1,011,842,550	96.45%	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Program Kerjasama Pembangunan	159,559,000	154,297,685	96.70%	
		Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	280,000,000	248,140,500	88.62%	
			Program perencanaan pembangunan ekonomi	254,130,000	242,826,300	95.55%	
			Program perencanaan sosial dan budaya	670,520,000	638,242,710	95.19%	
			Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	78,463,000	76,076,696	96.96%	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	634,952,000	594,359,268	93.61%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
27.	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal			41,314,471,870	34,343,734,422	83.13%	SILPA 16,87%
		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	15,426,956,150	13,346,092,131	86.51%	
		Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,562,568,000	1,275,948,335	81.66%	
		Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,858,779,000	1,750,893,565	94.20%	
		Penegakan PERDA	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	4,542,060,300	4,458,452,942	98.16%	
		Persentase Peningkatan PAD	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	857,520,000	841,999,830	98.19%	
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1,096,553,500	1,041,238,700	94.96%	
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	965,988,000	904,452,800	93.63%	
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	212,363,000	203,350,600	95.76%	
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	30,000,000	23,098,780	77.00%	
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	915,465,720	764,377,141	83.50%	
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru	15,000,000	9,726,515	64.84%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	12,370,472,500	8,327,379,661	67.32%	
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	79,816,600	78,115,498	97.87%	
			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	42,500,000	41,260,520	97.08%	
			Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	81,425,000	77,732,300	95.46%	
			Peningkatan Manajemen Kepegawaian	1,257,004,100	1,199,615,104	95.43%	
				335,447,100	270,860,155	80.75%	SILPA 19,25%
		Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	335,447,100	270,860,155	80.75%	
		Buku "PDRB Kabupaten"					
				373,398,000	358,859,750	96.11%	Efisiensi 3,89%
		Pengelolaan Arsip Secara Baku	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	181,765,000	176,238,800	96.96%	
		Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	25,560,000	25,468,300	99.64%	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	166,073,000	157,152,650	94.63%	
28.	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak			4,645,823,750	4,065,537,029	87.51%	SILPA 12,49%
		Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	2,808,047,750	2,737,402,864	97.48%	
		Web Site Milik Pemerintah Daerah	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	450,300,000	433,735,190	96.32%	
		Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	1,387,476,000	894,398,975	64.46%	
29.	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Cakil			2,798,336,533	2,700,963,549	96.52%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
		Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,798,336,533	2,700,963,549	96.52%	
		Bayi Berakte Kelahiran					
		Rasio Pasangan Berakte Nikah					
		Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK					
				102,017,000	95,523,700	93.64%	Efisiensi 6,36%
		Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	82,017,000	76,015,200	92.68%	
		Penyelesaian Izin Lokasi	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	20,000,000	19,508,500	97.54%	
	MISI VI : Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat						
30.	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat			2,206,209,000	2,118,820,579	96.04	Efisiensi 3,96%
		Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	Program pengembangan wawasan kebangsaan	402,000,000	390,779,610	97.21%	
		Kegiatan Pembinaan Politik Daerah					
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	383,330,000	375,482,715	97.95%	
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	222,000,000	213,212,600	96.04%	
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	135,500,000	119,992,250	88.56%	
			Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1,035,229,000	991,205,874	95.75%	
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	20,000,000	19,998,430	99.99%	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk	8,150,000	8,149,100	99.99%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Efisiensi/SILPA
			Menjaga Ketertiban Dan Keamanan				
31.	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat			10,675,747,150	3,395,063,382	31.80%	SILPA 69,20%
		Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	10,675,747,150	3,395,063,382	31.80%	
		Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat					
		Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana					
		Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana					
JUMLAH				755.743.358.729	547.368.466.255	72,43	SILPA 27,43

3.3.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pengelolaan pendapatan didasarkan pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Pajak daerah;
- 2) Retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Pemungutan sumber PAD tersebut tidak diperkenankan dengan :

1. Menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan perda tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain lain Pendapatan yang sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, pinjaman Daerah. Lain lain pendapatan terdiri dari dana hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan /lembaga dalam negeri atau perseorangan, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau kekurangan solvabilitas.

Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- 2) Penerimaan pinjaman daerah;
- 3) Dana cadangan daerah; dan
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah dan satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mengelola pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain. Peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun. Disamping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perlu juga penyertaan modal dari pihak ketiga ataupun masyarakat sebagai upaya diversifikasi di bidang pendapatan

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan daerah dalam menggali pendanaan otonomi daerah sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Sebagai salah satu pilar utama dalam pendanaan program/kegiatan pembangunan daerah agar dapat berjalan lancar, pengelolaan pendapatan turut mendapat

perhatian agar potensi perolehan pendapatan dapat maksimal, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan persentase target pendapatan sebagai berikut :

1. Triwulan I sebesar 28,79%
2. Triwulan II sebesar 28,86%
3. Triwulan III sebesar 27,73%
4. Triwulan IV sebesar 14,60%

Selanjutnya kebijakan Target PAD per Triwulan ini akan diikuti oleh kebijakan pada Belanja Langsung agar perolehan pendapatan dapat terserap dan dirasakan langsung dampak positifnya kepada masyarakat.

Pada Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, maupun yang berasal dari Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah. Perubahan Pendapatan Daerah terkait dengan upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Penyesuaian alokasi pendapatan dari Pemerintah atasan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

3.3.2.1 Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah diarahkan pada seluruh komponen PAD, Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari obyek-obyek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya memaksimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Ekstensifikasi dilakukan dengan menggali obyek-obyek baru yang berguna menambah penerimaan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kegiatan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:

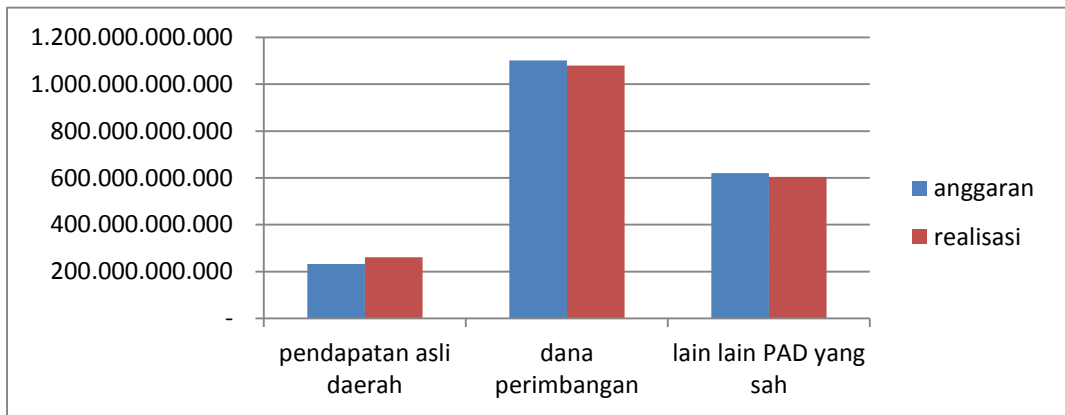
1. Penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang diawali dengan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan serta penetapan;
2. Penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk meningkatkan deviden;
3. Peningkatan prasarana dan sarana pendukung, SDM;
4. Peninjauan kembali terhadap dasar hukum pungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa maupun penyusunan perda baru;

5. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi)
6. Sosialisasi kepada masyarakat

Tingkat penerimaan pajak dan retribusi daerah ditentukan oleh kebijakan pendapatan dan efektifitas administrasi pendapatan. Kebijakan pendapatan meliputi penetapan besarnya tarif, penentuan obyek, pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan piutang pajak serta retribusi. Sedangkan efektifitas administrasi pendapatan meliputi efektifitas pendataan, penetapan, pemungutan pajak dan retribusi.

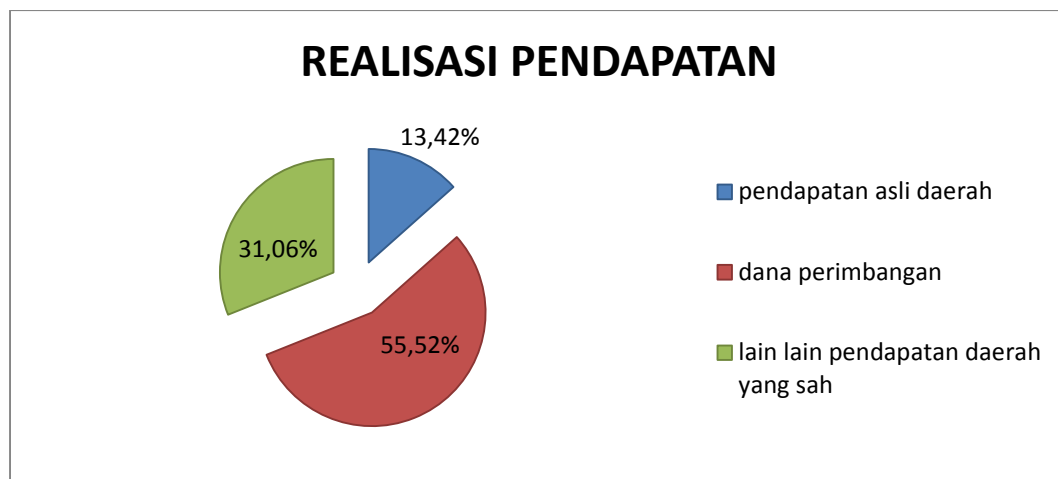
3.3.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.954.798.668.128,00 terealisasi Rp.1.945.475.130.480,00 atau mencapai 99,52 %. Perbandingan antara target dan realisasi pendapatan daerah Tahun 2015 secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2015

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.945.475.130.480,00 dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.261.088.971.092,00 (13,42%), Bagian Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.080.097.852.660,00 (55,52%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.604.288.306.728,00 (31,06%). Komposisinya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2
Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015

3.3.2.3 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan utama pendapatan daerah antara lain :

1. Terbatasnya sumber pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan dari Pemerintah Pusat dan provinsi
2. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana.

Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatasi permasalahan pendapatan daerah adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan pada seluruh komponen PAD. Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemungutan pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi dana perimbangan.
- c. Penggalangan dana pembangunan yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Infrastruktur sarana dan prasarana.

3.3.3 Pengelolaan Belanja Daerah

3.3.3.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertumpu pada kepentingan publik, dengan mengedepankan aspek-aspek efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman daerah, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) adalah belanja daerah, yang dipergunakan untuk memadai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan dan urusan pilihan yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah.

Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah. Guna mengoptimalkan pelaksanaannya maka perlu dikaji kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan pemerintah daerah agar potensi yang terbatas dapat dimanfaatkan secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran.

Adapun salah satu kebijakan daerah yang telah terkaji sebagai wujud penerapan tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran tentang Pengelolaan Belanja Daerah yaitu dengan menerapkan penempatan rencana Belanja Langsung SKPD berdasarkan persentase per triwulan sebagai berikut :

1. Triwulan I 18%
2. Triwulan II 30%
3. Triwulan III 32%
4. Triwulan IV 20%

Persentase penempatan rencana Belanja Langsung SKPD diatas diberikan batas toleransi prosentase (Interval) naik turunnya masing-masing triwulan sebesar maksimal 1 %. Pemberlakuan kebijakan ini tidak lain merupakan tindak lanjut atas kebijakan Target PAD per triwulan.

Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) per Triwulan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SPD Triwulan I diterbitkan ke SKPD setelah BUD menerima Dokumen Anggaran Kas SKPD.
- b. SPD Triwulan II, III dan IV diterbitkan ke SKPD setelah penggunaan dana SPD telah mencapai 75% (Tujuh puluh lima persen) dari realisasi SPD tahap sebelumnya.

Agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran daerah secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APBD pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah rakyat

kepada eksekutif dan legislatif untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan. Bertitik tolak pada hal tersebut, maka APBD Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut :

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dan DPRD kepada rakyat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBD kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

2) Disiplin Anggaran

Anggaran Daerah disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat di daerah sesuai dengan target dan sasaran pembangunan daerah. Anggaran yang tersedia pada setiap rekening/pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas / plafon anggaran yang ditetapkan.

3) Keadilan Anggaran

Pemerintah Daerah di dalam menetapkan besaran pajak dan retribusi harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di daerah, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

4) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan yang relatif masih terbatas untuk memberikan pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3.3.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah, dari anggaran sebesar Rp.2.226.627.483.960,00 terealisasi sebesar Rp.1.745.144.677.221,00 (78,38%), dengan rincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah sebagai berikut:

- a) Belanja tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp.1.470.524.125.231,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.197.532.043.191,00 (81,44%)

Belanja tidak langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja dianggarkan sebesar Rp.1.143.984.953.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.943.109.456.900,00 (82,44 %)

2. Belanja Hibah.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.25.473.737.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.802.955.000.,00 (14,93%)

3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada individu dan atau keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintah yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pada APBD Tahun Anggaran 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.332.175.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.12.917.126.200,00 (96,89%)

4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2015 , Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan pemerintah desa sebesar Rp 12.569.280.910,00 dan terealisasi sebesar Rp.12.544.867.910 (99,81%)

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa.

Bantuan Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan daerah.

Pada APBD Tahun Anggaran 2015, Bantuan keuangan dilokasikan sebesar Rp.224.813.572.484,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.223.848.656.231,00 (99,57%).

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

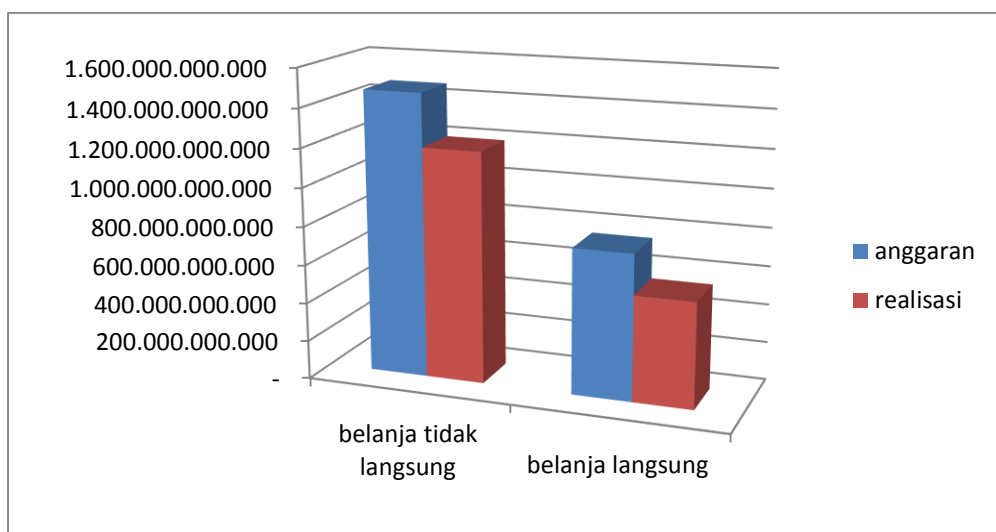
Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu: untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Secara geografis Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana maka setiap tahun selalu mengalokasikan belanja tidak terduga.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.50.350.406.837,00 telah terealisasi sebesar Rp.1.308.980.950,00 (2,60%).

7. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.756.103.358.729,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 547.612.634.030,00 (72,43 %)

Perbandingan antara target dan realisasi belanja langsung maupun belanja tidak langsung dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015

3.3.3.3 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan belanja daerah pada Tahun 2015 jika dilihat dari realisasi anggaran terealisasi sebesar 78,38 %.Belanja yang tidak terealisasi disebabkan antara lain :

- Adanya efisiensi belanja.Efisiensi anggaran tetap memperhatikan capaian target kinerja yang sudah ditetapkan, artinya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan tetap terjaga.
- Daftar calon penerima hibah yang belum memiliki Badan Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Regulasi/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan untuk DAK dari Pemerintah Pusat terlambat disahkan.
- Adanya proses lelang yang gagal/ lelang ulang.

Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatasi permasalahan belanja adalah melakukan perencanaan program dan kegiatan yang lebih akurat, peningkatan koordinasi baik secara internal Kabupaten Magelang maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, serta melaksanakan prinsip prinsip transparansi,akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan serta efisiensi dan efektifitas.

3.3.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit terjadi ketika anggaran belanja lebih besar daripada anggaran

pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus terjadi ketika anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

3.3.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).

Sisa lebih perhitungan tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD dianggarkan berdasarkan estimasi dan diperhitungkan dalam perubahan APBD berdasarkan peraturan daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Besarnya SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran pada Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya merupakan hasil perhitungan SiLPA yang telah diaudit oleh BPK.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam rangka menutup anggaran pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat.

- e. **Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah**
Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang telah diberikan pemerintah Kabupaten kepada masyarakat maupun BUMD.
- f. **Penerimaan Piutang Daerah**
Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pembayaran piutang.
Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :
- a. **Pembentukan dana cadangan**
Pembentukan dana cadangan digunakan untuk Pembangunan Pasar Muntilan, Pembangunan RSUD Daerah , Pembangunan Pasar Secang, Pembangunan Gedung Perpustakaan dan arsip daerah serta untuk Pilbup dan wabup Tahun 2018
- b. **Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah**
Investasi yang dilakukan pemerintah daerah antara lain : Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal pemerintah daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah .
- c. **Pemberian pinjaman daerah**
Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau BUMD.

3.3.4.2 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Secara garis besar realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.87
Target dan Realisasi Pembiayaan
Pemerintah Kabupaten Magelang 2015

No	Pembiayaan	Target	Realisasi	Selisih Lebih(Kurang)
A.	Penerimaan Pembiayaan	374.414.112.857	374.449.570.697	35.457.840
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	373.919.112.857	373.919.112.857.	0
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	210.000.000	245.457.840	35.457.840

No	Pembiayaan	Target	Realisasi	Selisih Lebih(Kurang)
	Penerimaan Hasil Penarikan AMU	285.000.000	285.000.000	0
B.	Pengeluaran Pembiayaan	102.585.297.025	82.585.297.025	(20.000.000.000)
	Pembentukan Dana Cadangan	91.521.930.000	71.521.930.000	(20.000.000.000)
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	10.763.367.025	10.763.367.025	0
	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000	300.000.000	0
	Pembayaran pengembalian pajak	0	0	0
	Pembiayaan Netto	271.828.815.832	291.864.273.672	20.035.457.840

Sumber: DPPKAD Kabupaten Magelang, 2016

3.3.5 Pengelolaan Tugas Pembantuan (APBN)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan (Pasal 1 ayat 11).

3.3.5.1 Dasar Hukum:

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.3.5.2 Tugas Pembantuan yang Diterima

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kotadan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dan tugas pembantuan.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat 9 (Sembilan) DIPA Tugas Pembantuan dari 5 Kementerian yang diterima oleh 8 SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 17.371.473.000. Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.248.636.860 (93,54%) dengan realisasi fisik sebesar 99,96%; secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.88
Tugas Pembantuan yang Diterima Kabupaten Magelang Tahun 2015

No	Kementerian	SKPD Pelaksana/No.DIPA	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisa si Fisik (%)
				(Rp)	(%)	
1	Kementerian Dalam Negeri	Bappeda 010.06.4.031954/2015	215.000.000	188.459.200	87,66	100
		Disdukcapil 010.08.4.031959/2015	2.288.033.000	1.859.440.260	81,27	100
2	Kementerian Pertanian	Distanbunhut 018.04.4.039069/2015	2.448.965.000	2.271.012.450	92,73	100
		BPPKP 018.11.4.039071/2015	551.763.000	540.968.150	98,04	100
		Dispeterikan 018.06.4.039557/2015	4.393.625.000	4.125.961.750	93,91	100
3	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi 026.04.4.039560/2014	525.520.000	735.656.570	97,46	99,01
4	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan 024.03.4.039561/2015	3.679.316.000	3.667.787.920	99,69	100
		024.04.4.031904/2015	1.039.915.000	947.832.400	90,18	100

No	Kementerian	SKPD Pelaksana/No.DIPA	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
				(Rp)	(%)	
5	KementerianPariwisata danEkonomiKreatif	DinasPariwisata danKebudayaan 040.01.4.031960/2015	2.000.000.000	1.921.518.160	96,08	100
JUMLAH			17.371.473.000	16.248.636.860	93,54	99,96

Program dan kegiatan pada DIPA berdasarkan SKPD pelaksana tugas pembantuan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bappeda

Program Bina Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan kegiatan berupa penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk penanaman tanaman sela (kacang tanah dan jagung) di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran, Desa Kebonagung Kecamatan Bandongan dan Desa Mangunrejo Kecamatan Kajoran, serta pembangunan jaringan pipa air siram tanaman di Desa Kebonagung Kecamatan Bandongan.

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Melaksanakan Program Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan kegiatan berupa pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Output kegiatan ini adalah Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk berupa5 jenis form, 2 blangko (KK,SKTT), Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Pengadaan Blangko dan Pencatatan Sipil berupa12 jenis form, 6 blangko, 6 jenis buku register.

c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
Melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Ramah Lingkungan. Output kegiatan ini adalah pengembangan kawasan tanaman buah seluas 20 ha di Kecamatan Srumbung ;Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (GAP) di lokasi Kelompok Tani (KT) Ngagrong dan KT Rejo Makmur Kecamatan Srumbung; Sekolah Lapang *Good Handling Practice* (GHP) di Kecamatan Srumbung dan penyediaan sarana prasarana di KT Ngagrong, KT Ngudi Rohmad, KT Ngudi Rejeki, KT Rejo Makmur dan KT Sido Makmur Kecamatan Srumbung.

2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Ramah Lingkungan. Output kegiatan adalah pengembangan kawasan tanaman florikultura seluas 48.000 m², Sekolah Lapang GAP, Sekolah Lapang GHP serta sarana prasarana budidaya dan pasca panen. Kegiatan ini dilaksanakan di KT Sumber Berkah Kecamatan Grabag.
 3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan. Kegiatan ini berupa sekolah lapang GAP, sarana dan prasarana budidaya di Kecamatan Dukun; sarana prasarana pasca panen sayuran dan tanaman obat di Kecamatan Dukun dan Kecamatan Kaliangkrik; pengembangan kawasan tanaman sayuran di Kec. Dukundan Kec. Pakis serta pengembangan kawasan tanaman obat di Kecamatan Tempuran dan Salaman.
 4. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan, Kegiatan ini berupa Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura di Kecamatan Dukun.
 5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Berupa penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura (1 laporan) serta penataan dan pengelolaan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian pengembangan hortikultura (2 dokumen); layanan perkantoran (12 bulan).
- d. Dinas Peternakan dan Perikanan**

Melaksanakan program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan pelaksanaan kegiatan :

1. Peningkatan Produksi Ternak, terdiri dari :
 - Pengembangan Budidaya Sapi Potong (100 ekor) di KT Lembu Ami luhur Dsn. Piji Ds. Podosoko, KT Kopeng Dsn Kopeng Ds. Kapuhan Sawangan dan KT Makmur Dsn. Plalar Ds. Genito Windusari, KT Ngudi Raharjo Dsn. Trisip Ds. Tampir Wetan Candimulyo.
 - Pengembangan Budidaya Sapi Perah (42 ekor) di KT Bumi Lestari Dsn. Dukuh Ds. Sumberejo, KT Garuda Dsn. Ds. Keditan Ngablak.
 - Pengembangan Budidaya Kambing Perah (30 ekor) di KT Candi Makmur Dsn Candisari Ds. Mranggen Srumbung.
2. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, terdiri dari :
 - Penguatan Pakan Induk Sapi Potong dengan output pakankonsentrat sapi potong sebanyak 22 ton di KT Ngudi Utomo Dsn. Ds. Bateh Candimulyo, KT Sumber Rejeki Dsn. Wulung Ds. Soronalan, KT Tunas Harapan Dsn. Podo Ds. Podosoko Sawangan.

- Penguatan Pakan Sapi Perah dengan output pakan konsentrat sapi perah sebanyak 23 ton di KT Mersika Dsn. Merapi sari Ds. Ngablak Kec. Ngablak.
 - Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemuk dengan output Pakan konsentrat sapi potong penggemuk sebanyak 165 ton di KT Rukun Tani Seketi Butuh Sawangan, KT Mbangun Urip I Paten Dukun, KT Podo Rukun Sekayu Timur Ketundan Pakis, KT Mugi Rahayu Sorobayan Ketawang Grabag dan KT Harum Sari I Sowanan Ds. Ngablak Kec. Ngablak.
 - Output lainnya adalah timbangan ternak elektrik sebanyak 8 unit, chopper (10 unit), bibit rumput/stek (121.000 stek), obat-obatan (15 paket), pompa dan pipa air (3 paket).
3. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; berupa Perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Keswan serta Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara masing-masing 1 dokumen laporan.

e. BPPKP

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dilaksanakan dengan kegiatan:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
Output kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan. Pada kegiatan ini terdapat 1 desa mandiri pangan yang diberdayakan (Desa Candirejo Kecamatan Borobudur) serta lokasi penanganan rawan pangan SKPG di Kabupaten Magelang.
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
Output kegiatan yang diharapkan adalah tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan. Dilaksanakan dengan pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) pada 18 desa di 13 kecamatan.
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
Output kegiatan berupa 1 dokumen laporan.

f. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja berupa padat karya infrastruktur. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 desa

pada 3 kecamatan yaitu Desa Bawang Kecamatan Pakis berupa pembangunan corblok dan senderan; Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman berupa pembangunan corblok dan perkerasan jalan; serta Desa Jumoyo Kecamatan Salam berupa pembangunan saluran irigasi.

- g. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan melaksanakan 2 DIPA dengan 2 program, yaitu

 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 29 puskesmas.
 2. Program Pembinaan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan kegiatan Penyehatan Lingkungan. Output kegiatan sarana dan prasarana Tempat Tempat Umum (TTU) sebanyak 1 unit serta sarana dan prasarana Tempat Penjamah Makanan (TPM) sebanyak 38 unit.
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Melaksanakan Program Pengembangan Kepariwisataaan pada Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem. Output dari kegiatan adalah fasilitasi / pendukung anamenitas / fasilitasi pariwisata. Pelaksanaan kegiatan berupa penataan Taman Rekreasi Mendut (lanjutan) di Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid dan penataan kawasan TIC Borobudur di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur.

3.3.5.3 Kantor Pusat

DPU dan ESDM Kabupaten Magelang pada tahun 2015 melaksanakan 2 kegiatan kewenangan Kantor Pusat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nama Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Magelang kode Satker 502866, dengan rincian sebagai mana table berikut :

Tabel 3.89
 Anggaran Kantor Pusat di Kabupaten Magelang Tahun 2015

No	Kementerian	SATKER/No. DIPA	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				(Rp)	(%)	(%)
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Magelang				
		033.05.1.502866/2015				
		Rupiah Murni	8.600.000.000	8.600.000.000	100,00	100,00
		PHLN	1.320.000.000	1.320.000.000	100.00	100,00
JUMLAH			17.371.473.000	16.248.636.860	100,00	100,00

DPU dan ESDM sebagai Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab.Magelang melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan 2 kegiatan yaitu :

1. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Outputnya adalah Infrastruktur Perdesaan. Dalam pelaksanaannya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dilaksanakan pada 50 desa di 18 kecamatan. Total anggaran sebesar Rp. 7.500.000.000 sehingga masing-masing desa memperoleh dana Rp. 150.000.000.
2. Pembinaan dan Pengembangan Air Minum. Outputnya adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.420.000.000 berupa Belanja Sosial Program Pamsimas (Pamsimas reguler APBN) dan Belanja Sosial Hibah Insentif Desa Program Pamsimas (Pamsimas HID).

Belanja Sosial Program Pamsimas (Pamsimas reguler APBN) sebesar Rp. 1.320.000.000 untuk SPAM Perdesaan di 6 desa, yaitu Desa Jogomulyo, Desa Ringinanom, Desa Wonogiri, Desa Banyusidi, Desa Podosokodan Desa Umbulsari.

Belanja Sosial Hibah Insentif Desa Program Pamsimas (Pamsimas HID) sebesar Rp. 1.100.000.000 untuk SPAM Perdesaan di 6 desa yaitu Desa Lesanpuro, Desa Surodadi, Desa Candisari, Desa Citrosono, Desa Kebonsaridan Desa Giripurno.

3.4. DAFTAR PRESTASI YANG DIRAIH TAHUN 2015

Berikut adalah daftar prestasi yang diraih Kabupaten Magelang selama tahun 2015 :

A. Kategori Umum

1. Sertifikat Adipura diraih oleh Kota Muntilan dengan PI 72,57.



2. Juara I Tingkat Nasional Lomba Kampung Iklim diraih oleh Desa Ngargo Mulyo Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.



3. Juara II Kinerja Raskin Terbaik, Tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih oleh Desa Pengarengan, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.



4. Juara I Pelaksana Posyandu Terbaik, Tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih oleh Posyandu Desa Nglumut, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang



5. Kategori Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia diraih oleh Pasar Mungkid.



6. Juara I Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Unggulan Jalur Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih oleh PIK 'FOGMEN', Dusun Ngepen, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.



7. Diperolehnya Sertifikat Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.



8. Kategori Stand Terbaik pada Pameran Java Expo di Yogyakarta.
9. Juara Harapan I Lomba Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
10. Kategori Paling Baik Kualitas Aktiva Produknya Tingkat Nasional yang diraih oleh KJKS BMT BIMA.
11. Juara I IKM Pangan Award diraih oleh Mirasa Food Industry.
12. Juara 3 IKM Pangan Award diraih oleh Wajik Week Salaman Kabupaten Magelang.
13. Juara Stand Terbaik dan Juara Harapan II Festival Desa Wisata diperoleh Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
14. Juara Harapan III Putra untuk Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jateng.
15. Juara III Lomba Konversi/Cerdas Cermat Pokdarwis Tingkat Provinsi Jateng.
16. Juara III Lomba Eskplorasi Cagar Budaya Tingkat Provinsi Jateng.
17. Juara II Lomba Film Dokumenter Tentang Cagar Budaya Tingkat Provinsi Jateng.
18. Juara Harapan II Kepariwisataaan Tingkat Provinsi Jateng Tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
19. Juara Nasional dan Provinsi Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi diraih oleh BPPK Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang.
20. Juara Nasional dan Provinsi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berprestasi diraih oleh Gapoktan “Ngudi Luhur” Desa Kaliurang Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.
21. Juara Nasional dan Provinsi Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi diraih oleh Koperasi Gapoktan Desa Tersan Gede Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
22. Penghargaan “Adhi Karya Pangan Nusantara” Peringkat II Kategori “Pelopor Ketahanan Pangan”, a.n. Maidar alamat : Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
23. Penghargaan “Adhi Karya Pangan Nusantara” Peringkat III Kategori “Kelompok Desa Mandiri Pangan”, a.n. Kelompok Afinitas Budidoyo, alamat : Desa Wuwuharjo, Kec. Kajoran Kabupaten Magelang.
24. Penghargaan “Adhi Karya Pangan Nusantara” Peringkat II Kategori “Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat” (LDPM), a.n. Gapoktan

- Koperasi Setia Tani, alamat : Desa Tampir Wetan, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.
25. Penghargaan “Adhi Karya Pangan Nusantara” Peringkat III Kategori “Pelayan Ketahanan Pangan”, a.n. Giyarto, SP (Penyuluh Pertanian), alamat : Desa Tampirwetan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang.
 26. Sertifikat LKM Sehat dari Otoritas Jasa Keuangan diraih oleh LKM “Ngudi Luhur” Desa Kaliurang Kecamatan Srumbung.
 27. Sertifikat LKM Sehat dari Otoritas Jasa Keuangan diraih oleh LKM-A Randu Makmur Desa Tegalrandu Kecamatan Srumbung.
 28. Sertifikat LKM Sehat dari Otoritas Jasa Keuangan diraih oleh LKM-A Tani Makmur, Desa Borobudur Kecamatan Borobudur.
 29. Peringkat V Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi sebagai Perintis Lingkungan Hidup diraih oleh Muhammad Dahlan, Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.
 30. Peringkat III Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi sebagai Penyelamat Lingkungan Hidup diraih oleh LMDH Wonorejo.
 31. Peringkat I Tingkat Provinsi Penghargaan Program Kampung Iklim diraih oleh Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.
 32. Peringkat V Tingkat Provinsi Kategori Pelestari Sumber Daya Genetik (SDG) Ternak diraih oleh Sulistyo Wibowo , Desa Ambartawang Kecamatan MUngkid Kabupaten Magelang.
 33. Peringkat VI Tingkat Provinsi Kategori Pelestari SDG Tanaman diraih oleh Bogel Windarto Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.
 34. Penghargaan Nasional Tangguh Award 2015 Kategori Pengelola Data Bencana dan Pusdaplops Terbaik BPBD Tingkat Kabupaten/Kota dari BNPB.
 35. Juara I Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional dalam rangka Bulan Pengurangan Resiko Bencana Nasional.
 36. Anugerah Penyiaran Jawa Tengah 2015 Kategori Program Talkshow Radio Terbaik diraih oleh Gemilang FM.
 37. Juara I Arsiparis Kategori Keterampilan dalam Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2015 diraih oleh Ari Parwanti, S. Sos.
 38. Juara I Tingkat Nasional dan Provinsi Tutor Kejar paket C pada Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi diraih oleh Susmiyati Jiwaningrum, S.Pd, MPd.

B. Kategori Pelajar

1. Bidang Olah Raga

Tabel 3.90

Daftar Atlet Pelajar Kabupaten Magelang Berprestasi
Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

NO	NAMA	SEKOLAH	CABANG OLAH RAGA	TINGKAT			JUARA	NAMA KEJUARAAN
				PROV	NAS	INTERNAS		
1	DAVINA GALUH ANGGRAENI	SDN KELEGEN	Taekwondo U 35 kg	v			II	POPDA SD Provinsi
2	TIM SMP PUTRI	GABUNGAN	BOLA VOLI	V			III	POPDA SMP Tk PROV. CABOR BOLA VOLI
3	TIM SMP PUTRA	GABUNGAN	BOLA VOLI	V			III	POPDA SMP Tk PROV. CABOR BOLA VOLI
4	SABRILLA MURNI	SMPN 1 SALAMAN	TAEKWONDO	V			III	POPDA SMP Tk PROV. CABOR TAEKWONDO
5	NANDA OKTAVIANA	SMAN 4 SEMARANG (PPLP)	ATLETIK	V			I	POPDA JAWA TENGAH CABANG ATLETIK LOMPAT JAUH
			ATLETIK	V			II	POPDA JAWA TENGAH CABANG ATLETIK LOMPAT JANGKIT
6	REEZA MAULANA	SMA TARUNA NUSANTARA	TAEKWONDO	V			II	POPDA JAWA TENGAH CABANG TAEKWONDO UNDER 73 KG
7	BERNA AMINTO	MAN 1 KARET MAGELANG	TAEKWONDO	V			III	POPDA JAWA TENGAH CABANG TAEKWONDO UNDER 55 KG
8	NUR EVA	SMAN 1 CANDIMULYO	TAEKWONDO	V			III	POPDA JAWA TENGAH CABANG TAEKWONDO UNDER 59 KG

NO	NAMA	SEKOLAH	CABANG OLAH RAGA	TINGKAT			JUARA	NAMA KEJUARAAN
				PROV	NAS	INTERNAS		
9	MEGA INDAH P.	SMAN 1 MERTOYUDAN	TAEKWONDO	V			III	POPDA JAWA TENGAH CABANG TAEKWONDO UNDER 52 KG
10	TIM BOLA VOLI PUTRA	GABUNGAN	BOLA VOLI	V			III	POPDA JAWA TENGAH CABANG BOLA VOLI PUTRA
11	TIM BOLA VOLI PUTRI	GABUNGAN	BOLA VOLI	V			III	POPDA JAWA TENGAH CABANG BOLA VOLI PUTRI
12	BIMANTORO KURNIANSYAH	SMPN 1 BOROBUDUR	WUSHU	V			I	KEJUARAAN WUSHU TK PROVINSI KELAS 39 KG PRA YUNIOR
				V			I	KEJUARAAN WUSHU SANDA PELAJAR PIALA BUPATI MAGELANG THAUN 2015
13	M RIDHO ADE ZULKARNAIN	SMPN 1 BOROBUDUR	WUSHU	V			I	KEJUARAAN WUSHU TK PROVINSI KELAS 52 KG PRA YUNIOR
					V		I	KEJURNAS MUAYTHAI PIALA WAPRES III TAHUN 2015 DI LOMBOK NTB
				V			I	KEJUARAAN WUSHU SANDA PELAJAR PIALA BUPATI MAGELANG THAUN 2015
14	FATCHOR ROCHMAN OKTAVIAN	SMP MUH BOROBUDUR	WUSHU	V			II	KEJUARAAN WUSHU TK PROVINSI KELAS 48 KG PRA YUNIOR
					V		I	KEJURNAS MUAYTHAI PIALA WAPRES III TAHUN 2015 DI LOMBOK NTB
						V	I	KEJUARAAN ASIA MUAYTHAY DIJAKARTA

NO	NAMA	SEKOLAH	CABANG OLAH RAGA	TINGKAT			JUARA	NAMA KEJUARAAN
				PROV	NAS	INTERNAS		
				V			I	KEJUARAAN WUSHU SANDA PELAJAR PIALA BUPATI MAGELANG THAUN 2015
15	SITI MASYITOH	SMPN 1 BOROBUDUR	WUSHU	V			III	KEJUARAAN WUSHU TK PROVINSI KELAS 42 KG PRA YUNIOR
				V			II	KEJUARAAN WUSHU SANDA PELAJAR PIALA BUPATI MAGELANG THAUN 2015
16	M RIFKI ARIFIN	SMPN 2 TEMPURAN	WUSHU	V			III	KEJUARAAN WUSHU TK PROVINSI KELAS 42 KG PRA YUNIOR
				V			I	KEJUARAAN WUSHU SANDA PELAJAR PIALA BUPATI MAGELANG THAUN 2015
17	M ZAINUR ANWAR		WUSHU	V			I	KEJURDA PELAJAR JATENG-DIY BUPATI CUP MAGELANG TAHUN 2015
18	BIMA PANJI DWIYANTO	SMK MA'ARIF KOTA MUNGKID	WUSHU	V			I	KEJURDA PELAJAR JATENG-DIY BUPATI CUP MAGELANG TAHUN 2015
				V			I	KEJUARAAN WUSHU TK PROVINSI KELAS 52 KG PRA YUNIOR
					V		II	KEJURNAS MUAYTHAI PIALA WAPRES III TAHUN 2015 DI LOMBOK NTB
						V	II	KEJUARAAN DUNIA MUAYTHAI DI THAILAND
18	SRI RUMHAYATI	SMAN 1 SALAMAN	WUSHU	V			III	KEJURDA PELAJAR JATENG-DIY BUPATI CUP MAGELANG TAHUN 2016

NO	NAMA	SEKOLAH	CABANG OLAH RAGA	TINGKAT			JUARA	NAMA KEJUARAAN
				PROV	NAS	INTERNAS		
19	FAJAR MAULANA	SMPN 1 BOROBUDUR	WUSHU	V			III	KEJURDA PELAJAR JATENG-DIY BUPATI CUP MAGELANG TAHUN 2017
20	ENDAH EKA ARISTYANINGRUM	SMAN 1 KOTA MUNGKID	ATLETIK				II	JATENG OPEN ATLETIK LARI
							III	JATIM OPEN ATLETIK LARI
21	RISKY CAHYO RAHARJO	SMPN I KOTA MUNGKID	RENANG	V			II	KRAS JAWA - BALI
							III	KRAS JAWA - BALI
22	YOGY AZIZ SUGIANTORO	SMPN 1 SALAMAN	TAE KWONDO	V			I	SALATIGA OPEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2015
23	PUTRA JATMIKO	SMAN 1 MEROYUDAN	TAE KWONDO	V			II	SALATIGA OPEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2015
24	ARIF RAHMAD	SMAN 1 MEROYUDAN	TAE KWONDO	V			III	SALATIGA OPEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2015
25	LUCKY AYU BAITUL PUTRI	SMAN 1 MUNTILAN	TAE KWONDO	V			II	SALATIGA OPEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2015
					V		II	INVITASI KEJ. TAE KWONDO PELAJAR DAN MAHASISWA TK. NASIONAL
26	HADANA SABILA A	SMPN 1 SALAMAN	TAE KWONDO	V			III	SALATIGA OPEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2015

NO	NAMA	SEKOLAH	CABANG OLAH RAGA	TINGKAT			JUARA	NAMA KEJUARAAN
				PROV	NAS	INTERNAS		
27	ANINDITA INDANA YULFA	SDN BANDONGAN 3	ATLETIK	V			II	O2SN SD TK. PROVINSI
28	CHANDRA	SMAN 1 MUNTILAN	KARATE	V			I	OOSN CABOR KARATE TINGKAT PROV. JAWA TENGAH DI SEMARANG
			KARATE		V		II	OOSN CABOR KARATE TINGKAT NASIONAL DI MAKASAR
					V		III	PONAS
				MEDALI				
				1	II	III		
1	CAHYONO	SMPN 1 SALAMAN	TAE KWONDO	1	5	6		
2	WAHYUNINGSIH. S.Pd	SDN BUMIHARJO	VOLI SMP PI			2		
3	GUNTORO, S,Pd	SMPN 2 SECANG	VOLI SMP PA			1		
4	HARYO GUNAWAN	SMK MUH 2 MUNTILAN	VOLI SMA PUTRA			1		
5	IWAN KUSMANA		ATLETIK	1	1			

NO	NAMA	SEKOLAH	CABANG OLAH RAGA	TINGKAT			JUARA	NAMA KEJUARAAN
				PROV	NAS	INTERNAS		
6	KUMONO		ATLETIK		1	1		
8	BERTHO		KARATE	1	1	1		

2. Bidang Ilmu Pengetahuan

Tabel 3.91
Daftar Siswa Berprestasi Kabupaten Magelang
Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

NO	NAMA	SEKOLAH	BIDANG LOMBA		TINGKAT	JUARA
1	AMANAH INDRIYANI	SMK Negeri 1 Ngabak	Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK	Jurusan Agronomi	PROVINSI	I
2	FIKA ASTI FANANI	SMK Negeri 1 Ngabak	Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK	Jurusan Peternakan	PROVINSI	I
3	REZA DZIKRI KHUSAINI	SMA Taruna Nusantara	OSN	FISIKA	NASIONAL	PERUNGGU
4	BAGUS WIJAYA KUSUMA	SMA Taruna Nusantara	OSN	BIOLOGI	NASIONAL	PERUNGGU
5	MUHAMMAD AUFAR K.	SMA Taruna Nusantara	AEROMODELING	Aeromodeling Spot Landing	NASIONAL	I
6	SALSABILA SILIWANGI S.	SMA Taruna Nusantara	BHS. INGGRIS	Bridge Design and Story Telling Competition	PROVINSI	I
7	GIDION IVAN ARLY	SMA Taruna Nusantara	BHS INDO	DEBAT BHS INDO	NASIONAL	I
8	FARADILA	SMA Taruna Nusantara				
9	ZEFANYA	SMA Taruna Nusantara				

NO	NAMA	SEKOLAH	BIDANG LOMBA		TINGKAT	JUARA
10	TAMARA	SMA Taruna Nusantara	BHS INDO	DEBAT LINGKUNGAN	NASIONAL	III
11	MESDA	SMA Taruna Nusantara				
12	ANDREAN BAGUS	SMA Taruna Nusantara				
13	GIDION IVAN ARLY	SMA Taruna Nusantara	PKn	DEBAT	NASIONAL	I
14	SALSABILA SILIWANGI S.	SMA Taruna Nusantara				
15	FADILA DYAH	SMA Taruna Nusantara				
16	LUHUR HIMANTARA	SMA Taruna Nusantara	KIR	PENELITIAN SISWA	NASIONAL	I
17	BAGAS PRAMANA PUTRA F	SMA Taruna Nusantara	KIR	YOUNG SCIENTIS COMPETITION	NASIONAL	PERAK
18	FEBRIANANDA WP	SMA Taruna Nusantara				
19	JAMAL HABIBURRAHMAN	SMA Taruna Nusantara	GEOGRAFI	GEOGRAPHY CHAMPIONSHIP	NASIONAL	I
20	SALMAN AL FARIZI	SMA Taruna Nusantara	MATEMATIKA	ICAS	INTERNASIONAL	PERAK
21	FEBRIANANDA WP	SMA Taruna Nusantara			INTERNASIONAL	PERUNGGU
22	AHMAD HAULIAN YOGA P	SMA Taruna Nusantara			INTERNASIONAL	PERUNGGU
23	BONANG TITIAN	SMA Taruna Nusantara	BHS. JERMAN	ENTERPRENEUR PROGRAM	NASIONAL	I
24	NURIL NISWATUN	SMA Taruna Nusantara				
25	NARESWARI	SMA Taruna Nusantara				
26	NI WAYAN YESSICA	SMA Taruna Nusantara	BHS. JERMAN	OLIMPIADE BHS. JERMAN	PROVINSI	I
27	KINASIH S.	SMA Taruna Nusantara				II